Seri Policy Entrepreneur Vol. 1

# BELAJAR DARI *CHAMPIONS*

## Kiat Sukses Membangun Air Minum dan Sanitasi

Pokja AMPL Nasional

# BELAJAR DARI *CHAMPIONS*

Kiat Sukses Membangun Air Minum dan Sanitasi

Diterbitkan Oleh:

POKJA AMPL

**Belajar dari *Champions***
**Kiat Sukses Membangun Air Minum dan Sanitasi**
Copyright © Pokja AMPL Nasional, 2014

**Penulis:**
Siswanto
Dingot Hamonangan Ismail
Zulkifli Al-Humami
Islahuddin

**Editor:**
Nurul Wajah Mujahid
Ira Lubis
Aldy Mardikanto

**Tata Letak & Isi:**
Visi Aulia Jaya

**Desain Sampul:**
Visi Aulia Jaya

i-viii + 92 hal; 130 x 200 mm
ISBN: 978-979-17112-8-9

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

# Kontributor

**Pemerintah**
Dedi S. Priatna, Nugroho Tri Utomo, Eko Wiji Purwanto, Laisa Wahanudin (Bappenas); M Zulfikar, Romanus, Aulia UF (Kemen PU-Pera).

Julius Honesti (Bappeda Sumatera Barat); Edy Basuki (Dinkes Jawa Timur); Ida Ayu Wardiani (Bappeda Tabanan); Saharudin, Mohammad Hanafi (Bappeda NTB); Erna Purnawati, Syamsul Hariadi (DPUBMP Kota Surabaya); Pan Budi Marwoto (Bappeda Kab. Bangka); Andreas Warho (Bappeda Kab. Ende); Ekki Riswandiyah (Dinkes Kab. Sumedang); Teti Supriati (Dinkes Kota Cimahi).

**Dunia Usaha**
Usman (Bank Jombang)
Yulis (Koperasi Denas 66)
Ghufron Sholohin (PT Adaro Energy Tbk).

**Pegiat Air Minum dan Sanitasi**
Sjukrul Amin (Jakarta)
Warga (Subang); Ayub, Angel (Ende); Budi Laksono (Semarang); Agung Prasetyo, Novian Dany Indrawan, Meri, Sugeng, Derajat, Deni Suryadi (Solo); Sumihardi (Padang); Andi Bungawati (Palu).

**Sekretariat Pokja AMPL Nasional**
Cheerli, Betanti Ridhosari, Rozi Kurnia, Meddy Chandra, Yanuar Wachyudi.

**Mitra AMPL**
Josrizal Zain (Akkopsi); Heri (Plan); Virgi Fatmawati, Andi Musfarayani, Andreas Sinaga, Lutz Kleeberg, Ahmad Hermanto, Budi Darmawan (IUWASH); Danang Pidekso (Perpamsi); Rahmi Kasri, Maraita Listyasari, Devi Setiawan (WSP); Candra Wijaya (WVI).

# Daftar Istilah

| | |
|---|---|
| AMPL | Air Minum dan Penyehatan Lingkungan |
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional |
| BAB | Buang Air Besar |
| BABS | Buang Air Besar Sembarang |
| Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Bappenas | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BUMDes | Badan Usaha Milik Desa |
| CTPS | Cuci Tangan Pakai Sabun |
| CSR | *Corporate Social Responsibility* |
| DPA | Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| BPBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| DPUBMP | Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan |
| DK3 | Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota |
| HIPPAMS | Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi |
| IPAL | Instalasi Pengolahan Air Limbah |
| IPLT | Instalasi Pengolahan Limbah Tinja |
| IPM | Indeks Pembangunan Manusia |
| Katajaga | Kampung Total Jamban Keluarga |
| KSM | Kelompok Swadaya Masyarakat |
| MCK | Mandi Cuci Kakus |
| PAD | Pendapatan Asli Daerah |
| PAH | Penampungan Air Hujan |
| Pamsimas | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat |
| PDAM | Perusahaan Daerah Air Minum |
| PHBS | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| Pemkab | Pemerintah Kabupaten |
| Pemkot | Pemerintah Kota |
| Pemprov | Pemerintah Provinsi |
| Pokja | Kelompok Kerja |
| PPK | Pejabat Pembuat Komitmen |
| PPSP | Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman |
| Sanimas | Sanitasi Berbasis Masyarakat |
| SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| TSLP | Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan |
| TTG | Teknologi Tepat Guna |

# Kata Pengantar

Salah satu tantangan serius kita bangsa Indonesia adalah seberapa mampu kita menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan air minum dan sanitasi. Menumbuhkan kesadaran tentang air minum berarti menumbuhkan kemampuan kita dalam mengelola, memanfaatkan, mengeksplorasi, dan mengembangkan berbagai potensi air itu sendiri, sekaligus menumbuhkan kemampuan kita dalam menangani, mengantisipasi, dan memecahkan berbagai masalah yang ditimbulkannya, termasuk masalah yang ditimbulkan oleh krisis air.

Sementara itu, masalah sanitasi hampir sepenuhnya merupakan dampak dari perilaku manusia. Di samping kebiasaan perilaku individu, kondisi sanitasi kita diperparah oleh perilaku kolektif masyarakat kita sendiri. Kebiasaan membuang sampah sembarangan atau kebiasaan membangun jamban di sungai, misalnya, memberikan kontribusi pada buruknya sanitasi kita. Karenanya, tidak sulit untuk menemukan sanitasi yang begitu menyedihkan di Indonesia, baik di desa maupun di kota. Secara umum dapat dikatakan bahwa budaya sanitasi kita sangat memprihatinkan.

Buku yang kini berada di tangan anda ini memperlihatkan sedikit cahaya di ujung terowongan masalah air minum dan sanitasi kita. Bagaimanapun kita punya para kampiun (*champions*) yang dengan dedikasi tinggi telah bergerak di bidang-bidang yang penuh tantangan baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Mereka memikirkan masalah-masalah tersebut dengan

visi, pemikiran, program, kegiatan, dan pengalaman konkret masing-masing. Melihat bahaya krisis air minum dan terutama bahaya sanitasi kita yang begitu buruk, tak syak lagi bahwa sampai batas tertentu mereka telah menyelamatkan Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor ini mengalami pertumbuhan sangat cepat. Sektor ini mampu membalik paradigma *top down* menjadi *bottom up*. Aktor utama perubahan di sektor ini adalah para *champion* itu sendiri, baik dari kalangan pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, akademisi, hingga para individu kreatif yang mengabdi pada lingkungan. Peran para *champion* dalam penanganan permasalahan di sektor air minum dan sanitasi menunjukkan betapa prinsip *participatory*, bukan *mandatory*, begitu mudah diterapkan. Sebagai contoh, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada awalnya di tahun 2009 hanya diikuti oleh 12 kota, namun di akhir tahun 2014 telah diikuti oleh 444 kabupaten/kota. Peran Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), di sejumlah daerah juga berperan sebagai *champion*, ternyata ampuh untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah.

Maka, patutlah kita menimba inspirasi dari mereka, untuk melipatgandakan apa yang telah mereka lakukan. Semoga. Salam.

Selamat membaca!

Nugroho Tri Utomo
Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
Selaku
Ketua I Pokja AMPL Nasional

# Daftar Isi


| | | |
|---|---|---|
| Kontributor | | iii |
| Daftar Istilah | | iv |
| Kata Pengantar | | v |
| Daftar Isi | | vii |
| Bagian I | Menumbuhkan Kepekaan | 1 |
| | 1. Sadar Krisis | 3 |
| | 2. Samakan Persepsi dan Komitmen | 9 |
| Bagian II | Strategi Sukses Manajemen | 15 |
| | 3. Sinergi Potensi yang Ada | 17 |
| | 4. Dari Masyarakat untuk Masyarakat | 23 |
| | 5. Memaksimalkan Peran Fasilitator | 31 |
| | 6. Kreatif Membangun Bisnis Sanitasi | 37 |
| | 7. Inovasi Sarana Sanitasi | 47 |
| Bagian III | Strategi Sukses Kepemimpinan (*Leadership*) | 53 |
| | 8. Pemimpin yang Menggerakkan | 55 |
| | 9. *Political Will* | 63 |
| | 10. Mendelegasikan Kewenangan | 69 |
| Bagian IV | Mobilisasi Pendanaan (*Fundraising*) | 73 |
| | 11. Libatkan Lembaga Keuangan | 75 |
| | 12. Menggalang Dukungan Pendanaan | 83 |
| | 13. Swadana Pengelolaan | 89 |

Bagian I

# Menumbuhkan Kepekaan

1. Warga Desa Tiwerea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, NTT mengambil air cukup jauh pada musim kemarau.
2. Penampungan Air Hujan (PAH) menjadi andalan warga untuk mendapatkan air.

Foto-foto: Pokja AMPL Nasional

# 1 Sadar Krisis

Lihat ada masalah?
Jangan cuma panggil orang lain untuk turun tangan, tapi panggil diri sendiri untuk turun tangan.

ANIES BASWEDAN
*Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*

Datang tak diundang, pulang tak diantar. Itulah kalimat yang sering diucapkan banyak orang manakala mereka berhadapan dengan krisis. Ungkapan tersebut benar adanya. Namun, sebagai makhluk yang diberikan kelebihan akal budi lebih tinggi daripada makhluk lainnya, manusia sejatinya bisa mengatasi krisis. Kelebihan ini dikenal dengan istilah *sense of crisis*, yang telah menyelamatkan manusia dari kepunahan dalam perjalanan kehidupan di bumi.

Banyak krisis yang muncul sepanjang sejarah perjalanan manusia, termasuk krisis di sektor air minum dan sanitasi. Krisis ini bisa terjadi karena faktor alam, namun juga bisa hadir karena ulah manusia sendiri. Krisis karena kondisi alam, misalnya, terlihat di banyak daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masyarakat di daerah ini menghadapi krisis langkanya akses air minum, terutama di daerah-daerah dataran tinggi. Mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan air. Tidak hanya air minum, mereka juga berjibaku menyediakan sanitasi yang layak untuk komunitasnya. Krisis serupa, juga krisis lainnya seperti krisis lingkungan, terjadi pula di banyak daerah di Indonesia.

Bagi masyarakat yang berhadapan dengan krisis, mereka perlu menyadari keberadaan krisis tersebut. Dengan kata lain, masyarakat dituntut memiliki *sense of crisis*. Dengan *sense of crisis*, manusia bisa mengambil pelajaran dari berbagai krisis yang terjadi dengan membuat langkah-langkah untuk mengatasinya jika krisis datang kembali.

> "Salah satu cara mengasah ketajaman *sense of crisis* adalah dengan mempelajari cara-cara yang dilakukan orang lain dalam menghadapi krisis"

Karenanya, *sense of crisis* perlu selalu diasah ketajamannya agar tetap responsif terhadap datangnya krisis "yang tak pernah diundang". Salah satu cara mengasah ketajaman *sense of crisis* adalah dengan mempelajari cara-cara yang dilakukan orang lain dalam menghadapi krisis. Belajar dari pengalaman orang lain seperti itu jauh lebih mudah karena kita hanya perlu menirunya. Jika apa yang ditiru tidak pas dengan kondisi yang kita hadapi, cukup melakukan sedikit penyesuaian. Dan, ini juga mudah. Jadi, menghadapi krisis bukanlah hal yang menakutkan. Modalnya adalah *sense of crisis* yang diasah terus-menerus.

Krisis bisa melahirkan *champion* di sektor air minum dan sanitasi. Para *champion* bisa berasal dari berbagai kalangan. Ada dari pihak pemerintah, masyarakat, instansi swasta, akademisi hingga wirausahawan sanitasi. Dengan kesadaran yang kuat terhadap

krisis air minum dan sanitasi yang terjadi di daerahnya, mereka berhasil mencari solusi terkait dua bidang itu. Semua *champion* memberikan kontribusi sesuai tantangan dan kemampuan yang mereka miliki.

Manakala *sense of crisis* tumbuh, ia juga bisa menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin berusaha. Para pengusaha sanitasi membantu percepatan pembangunan fasilitas sanitasi. Kehadiran mereka didukung juga oleh situasi pasar lokal. Dari sisi *sustainability*, pengusaha-pengusaha itu membantu menjaga pembangunan, karena bisa saja sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya untuk menjalankan program-program penyediaan air minum dan sanitasi yang berasal dari pemerintah dan lembaga donor terhenti. Bukankah masyarakat adalah benteng terakhir dari pendanaan?

Kini, dukungan untuk para pengusaha air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat juga datang dari kalangan perbankan atau lembaga pembiayaan. Di beberapa daerah, kini sudah lazim bank memberikan kredit jamban kepada masyarakat yang ingin membangun sanitasi layak di rumah. Ada juga koperasi yang melakukan hal ini.

## Tanpa Akses Air dan Sanitasi

Apa krisis yang menakutkan? Salah satunya adalah krisis air. *Kok* bisa ada krisis air, padahal dua per tiga bumi ini ditutupi oleh air? Bukankah seharusnya dengan karakteristik bumi yang seperti itu tidak ada masalah dengan ketersediaan air. Memang benar, bumi memiliki lebih banyak lautan daripada daratan, namun krisis air terjadi bukan karena kita kekurangan air, tapi lebih disebabkan oleh perilaku manusia terhadap air. Dalam bahasa akademis, terjadinya krisis air karena manajemen pengelolaan air yang tidak baik.

Tentu saja ada pengecualian. Pada daerah-daerah yang tergolong tandus, seperti Ende NTT, krisis air terjadi memang lebih banyak diakibatkan oleh keadaan alam. Dalam kunjungan lapangan ke desa-desa di wilayah administrasi Kabupaten Ende, NTT, ditemukan kondisi alam yang keras dimana air sulit ditemukan oleh penduduk. Mereka harus berjalan antara satu hingga dua kilometer untuk mendapatkan air.

"Krisis air tidak hanya terjadi di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Ende, NTT. Tetangganya, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menghadapi masalah yang sama"

Beberapa warga pernah mencoba untuk mengebor tanah guna mendapatkan sumber air. Tetapi, hingga kedalaman 20 meter, air tak kunjung keluar. Begitu berat untuk mendapatkan air di sana, padahal wilayah itu dikelilingi oleh air laut. Karena sulit mendapatkan air, akhirnya warga mengembangkan kebiasaan "irit air". Mereka menggunakan air sedikit mungkin, bahkan bila perlu tidak memakai air sama sekali. Akhirnya, mereka kurang mandi, kurang cuci tangan, kurang cebok, dan sebagainya. Kebiasaan ini memicu krisis yang lain, yaitu buruknya sanitasi. Keadaan tidak lebih baik pada beberapa daerah yang kaya air, karena kekayaan tersebut dirusak oleh keadaan sanitasi yang buruk.

Krisis air tidak hanya terjadi di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Ende, NTT. Tetangganya, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menghadapi masalah yang sama. Begitu pula dengan Kabupaten Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan sejumlah daerah lain.

Menurut Mohammad Hanafi, Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Gubernur NTB merasa sangat prihatin dengan kondisi warganya yang hidup

dengan air serba terbatas. Gubernur NTB berkomitmen bahwa masalah air di NTB akan tuntas pada tahun 2018, tahun terakhir jabatannya. Komitmen Gubernur NTB untuk menuntaskan akses air universal bagi masyarakat NTB merupakan janji dia saat kampanye. "Zalim kita jika tidak membantu masyarakat untuk mengakses air minum dan sanitasi," kata Hanafi mengutip ucapan Tuan Guru Bajang, panggilan kehormatan untuk Gubernur NTB M. Zainul Majdi.

Ada banyak cerita yang mengisahkan tentang kesulitan air di NTB, khususnya di Lombok Timur bagian selatan dan Lombok Tengah. Krisis air membuat masyarakat kesulitan bahkan ketika akan memandikan jenazah. Air sering lebih mahal dibandingkan hewan ternak. Tak heran, tutur Hanafi, banyak warga mengaku lebih rela memberikan ayam atau daging kambing dan sapi kepada pejabat yang datang ketimbang memberikan air. "Tapi, sekarang kondisi sudah jauh lebih baik," kata Hanafi.

Tidak hanya krisis air yang membahayakan lingkungan dan kesehatan, krisis di sektor sanitasi pun terbukti menimbulkan banyak penyakit dan bahkan mengakibatkan kematian. Di sinilah ketajaman *sense of crisis* kembali diuji.

*Sense of crisis* bisa muncul dari berbagai peristiwa, seperti yang dialami oleh Budi Laksono, seorang dokter yang bertugas di Jawa Tengah yang sering mendapati pasien menderita penyakit yang disebabkan saluran pencernaan. Dia kemudian melakukan penelitian dan berkesimpulan penyakit disebabkan perilaku warga yang buang air besar sembarang (BABS). Kesadaran atas krisis ini mengantarkan Dokter Budi membuat jamban yang bisa dijangkau masyarakat. Sejak tahun 2004 hingga saat ini, dia sudah hampir membangun 8.000 jamban sehat di Jawa Tengah. *Sense of crisis* yang kemudian melahirkan solusi ini telah banyak dicontohkan para *champion* lainnya.

Foto-foto: Pokja AMPL Nasional

1. Warga mengandalkan fasilitas umum untuk mendapatkan air.
2. Warga mengambil air tanah melalu pompa manual.

# 2 Samakan Persepsi dan Komitmen

Kebijakan publik yang efektif diawali dengan adanya kesamaan persepsi mengenai isu yang harus ditangani.

NUGROHO TRI UTOMO
*Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas*

Ada sejumlah isu lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Isu itu diantaranya adalah sanitasi individu atau sanitasi komunal. Berdasarkan banyak kajian, saat ini orientasi program sanitasi yang dijalankan masih bersifat individual. Artinya, jamban atau kloset yang ada di setiap rumah warga tangki septik-nya dapat menjadi masalah bagi air yang bersumber dari dalam tanah. Apalagi jika tangki septik yang ada tidak pernah/jarang dikuras atau pembuatannya tidak sesuai dengan standar. Salah satu isu yang harus dijadikan perhatian bagaimana mengedukasi dan mengawasi kepatuhan terhadap standar tersebut. Jika masalah tersebut bisa diatasi, sebagian masalah lingkungan bisa terselesaikan.

Jamban sehat bukan hanya fasilitas yang terdiri dari kloset yang dilengkapi tangki septik. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah jamban disebut sehat. Sejumlah kriteria tersebut adalah tidak mengontaminasi badan air, menjaga agar tidak kontak antara manusia dan tinja, tinja tidak dihinggapi lalat atau vektor lainnya termasuk binatang, hingga menjaga buangan tidak menimbulkan bau.

Diantara syarat limbah tinja tidak mengontaminasi sumber air adalah letak lubang penampungan kotoran paling dekat berjarak 10 meter dari sumur. Tangki septik juga perlu dikuras secara berkala, tiga hingga lima tahun sekali. Pengurasan berkala ini untuk menghindari kebocoran yang bisa berakibat pencemaran pada sumber air sekitarnya. Sementara itu, tidak berbau berarti tidak memungkinkan serangga dapat masuk ke penampungan tinja. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan menutup lubang jamban atau dengan sistem leher angsa.

Setelah mengetahui beberapa kriteria jamban sehat, semua orang perlu memperhatikan jamban yang ada di sekitarnya apakah sudah memenuhi syarat tersebut atau belum. Perlu juga disampaikan pertanyaan, apakah jamban yang kita miliki sudah rutin disedot atau tidak pernah sama sekali.

Setelah pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan kepada diri sendiri dan keluarga, perlu juga melihat pada lingkungan sekitar. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak fakta yang menunjukkan bahwa banyak jamban dibangun, tapi air limbah tinja dibuang langsung ke sungai atau saluran yang ada di sekitar jamban. Bagi pemilik jamban, ini bukan

> “Masih banyak fakta yang menunjukkan bahwa banyak jamban dibangun, tapi air limbah tinja dibuang ke sungai atau saluran yang ada di sekitar jamban.”

masalah, tetapi bagi orang yang memanfaatkan air sungai bisa menjadi masalah besar.

Perbedaan persepsi ini masih banyak didapati di sekitar kita. Pada kondisi seperti ini, perlu peran para *champion* untuk turut menggerakkan masyarakat. Para *champion* bisa berasal dari masyarakat sendiri, tokoh atau pemerintah terdekat seperti perangkat desa hingga kepala daerah.

“Di tengah banyaknya permasalahan tersebut, dibutuhkan penyamaan persepsi dan kesadaran bersama untuk mencari solusi dan menyelesaikannya dengan segera.”

Perlu penyamaan komitmen, bahwa kondisi tidak sehat ini harus segera ditanggulangi. Jika masih ada yang belum menyadari, maka perlu adanya penyampaian informasi kepada masyarakat untuk menyadari bahwa ada yang salah pada lingkungan mereka. Munculnya kesadaran ini akan melahirkan komitmen bersama untuk melakukan perbaikan dan penyehatan lingkungan.

Tidak hanya kriteria jamban sehat yang sering tidak dipahami masyarakat. Di persampahan, banyak masyarakat kurang sadar bahwa selama ini ada perilaku tidak sehat berupa membuang sampah sembarangan atau membakarnya. Perilaku buruk ini sangat mudah dijumpai, terutama di perkotaan, di mana produksi sampah setiap hari sangat besar. Perilaku buang sampah ini bahkan dilakukan oleh orang-orang terdidik. Ada yang sadar bahwa membuang sampah sembarangan adalah perilaku buruk, namun tetap melakukannya, karena tidak tersedia tempat pembuangan sampah. Ada juga anggapan bahwa masalah persampahan adalah tugas pemerintah atau petugas kebersihan, padahal ini adalah tugas bersama.

Di tengah banyaknya permasalahan tersebut, dibutuhkan

penyamaan persepsi dan kesadaran bersama untuk mencari solusi dan menyelesaikannya dengan segera. Jika bukan sekarang, maka masalah akan semakin menumpuk dan lingkungan akan bertambah kritis.

## Memperlakukan Air dengan Tepat

Saat ini berkembang sebuah persepsi di antara sebagian masyarakat bahwa air merupakan sumber daya alam yang gratis. Persepsi ini diperkuat dengan kesalahan dalam menafsirkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yang menyebutkan "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Apakah air harus selamanya dinikmati gratis dan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk mendapatkannya? Pertanyaan ini perlu direnungkan bersama.

"Apakah air harus selamanya dinikmati gratis dan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk mendapatkannya? Pertanyaan ini perlu direnungkan bersama."

Perlu dicatat, tidak ada sumber air yang mampu secara otomatis mengalirkan air langsung ke rumah, juga tidak semua orang hidup di dekat sumber air. Bahkan orang tinggal di dekat sungai yang berlimpah air pun tidak boleh secara sembarangan menggunakannya, seperti buang air besar langsung di sungai.

Air perlu dikelola dengan baik. Untuk mendapatkan air yang layak perlu sumber air yang cukup, teknologi yang memadai, butuh instalasi penyambungan yang handal, hingga sumberdaya manusia yang kompeten. Pengelolaan air ini membutuhkan biaya, namun tantangannya adalah bagaimana menyediakan air minum yang terjangkau.

Perlu ada pandangan yang sama bahwa air adalah benda yang berharga. Jika semua pihak mempunyai pandangan yang sama tentang air minum, maka dapat berkomitmen untuk memperlakukan air dengan seharusnya.

Sampah perkotaan terus bertambah. Masalah ini akan terus membesar jika tidak ada komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikannya.

Bagian II

# Strategi Sukses Manajemen

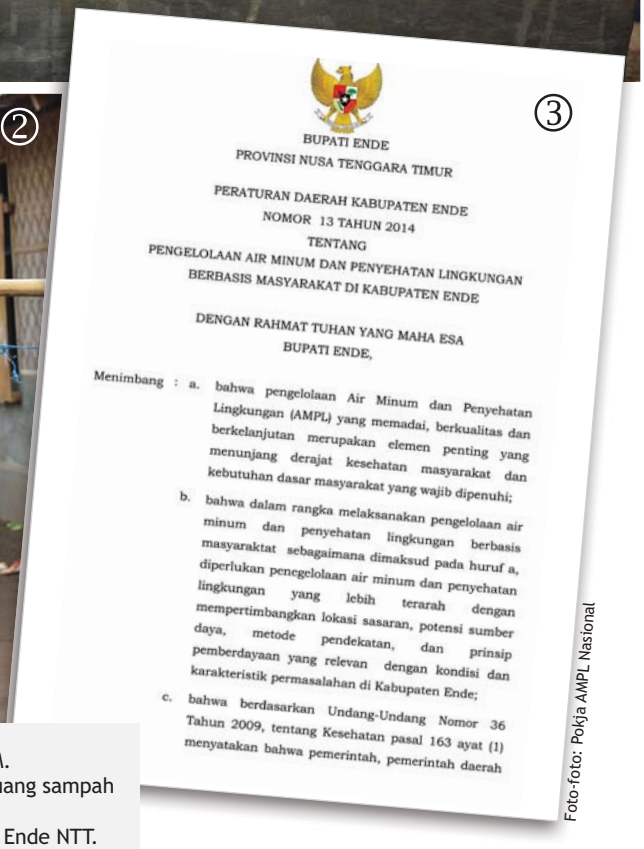


BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan merupakan elemen penting yang menunjang derajat kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyaraktat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penegelolaan air minum dan penyehatan lingkungan yang lebih terarah dengan mempertimbangkan lokasi sasaran, potensi sumber daya, metode pendekatan, dan prinsip pemberdayaan yang relevan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan di Kabupaten Ende;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah

Foto-foto: Pokja AMPL Nasional

1. Prasasti Deklarasi STBM.
2. Papan larangan membuang sampah sembarangan.
3. Perda AMPL Kabupaten Ende NTT.

# 3 Sinergi dan Kolaborasi Potensi yang Ada

Kini bukan jamannya mengubah jaman sendirian. Kita perlu bersama-sama, kita perlu berkolaborasi. Kolaborasi ibarat kunci pintu rumah yang bernama masyarakat madani.

RIDWAN KAMIL
*Walikota Bandung*

Pembangunan akses air minum dan sanitasi melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders)*. Banyaknya *stakeholder* di satu sisi bernilai positif, namun bisa juga memunculkan sisi negatif jika potensi yang ada tidak bisa disatukan. Perlu ada tim yang solid dari berbagai latar belakang dan keahlian.

Sejumlah daerah berhasil membangun *team work* untuk meringankan beban kerja, dan membuat pekerjaan lebih mudah diselesaikan. Penyatuan mudah dilakukan karena tidak ada ego sektoral pada masing-masing *stakeholder*. Contoh daerah yang berhasil membentuk *team work* adalah Kabupaten Ende (Nusa Tenggara Timur), Tabanan (Bali), Sumedang (Jawa Barat), dan Kota Cimahi (Jawa Barat).

## Kembangkan Komunikasi Informal

Kunci keberhasilan membentuk *team work* salah satunya ditentukan oleh kualitas komunikasi. Contoh keberhasilan ini diperlihatkan oleh sejumlah Pokja AMPL daerah. Komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam Pokja berjalan lancar. Mereka melakukan komunikasi informal dan langsung ke "*contact person*". Cara-cara informal bukan berarti menafikan struktur birokrasi yang melekat pada instansi pemerintah. Komunikasi birokratis seperti surat-menyurat tetap dilaksanakan, namun tidak menjadi cara utama. Cara-cara birokrasi berjalan beriringan dengan komunikasi informal yang penuh keakraban.

Cara ini dipraktikkan oleh Pokja AMPL Kabupaten Ende. Di Ende, ada empat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang aktif dalam isu air minum dan sanitasi yaitu Bapedda, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)."Dengan komunikasi langsung antar personal, anggota yang aktif bisa cepat berkumpul tanpa menunggu surat formal," jelas Andreas Warho, Kasi Pembangunan Bappeda Ende.

Cara sama juga dilakukan oleh para *stakeholder* air minum dan sanitasi di Kabupaten Sumedang. Mereka mempunyai forum "*ngadu bako*". Dalam bahasa Sunda, *ngadu bako* berarti menghisap tembakau bersama-sama. Dalam konteks ini, *ngadu bako* merupakan forum yang menunjukkan adanya keakraban antar *stakeholder*. "Tanpa undangan resmi, kami bisa duduk bareng. Kita komunikasi melalui *SMS*, dan undangan menyusul," jelas Ekki Riswandiyah, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan (Kesling), Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

> "Dengan komunikasi langsung antar personal, para anggota yang aktif bisa cepat berkumpul tanpa menunggu surat formal"

Menurut Ekki, komunikasi informal mampu mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Berbeda dari komunikasi formal yang membutuhkan waktu karena menunggu disposisi surat dan proses birokratis lainnya. Ekki yang juga menjabat Sekretaris Umum Pokja AMPL Sumedang mengatakan, anggota Pokja AMPL Sumedang sejak awal terbentuk sudah terbiasa berkoordinasi, walaupun saat itu anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Bahkan Pokja AMPL pernah dikenal dengan sebutan "Romli", singkatan dari "Rombongan *lillahi ta'ala*", yang hanya mengharapkan pahala Tuhan.

Ekki mengaku, komunikasi informal antar-*stakeholder* tidak hanya ada di tingkat kabupaten, namun juga diterapkan hingga tingkat desa. Cara ini dilakukan agar terbentuk kelembagaan yang kuat hingga tingkat desa. "Jika kelembagaan tidak sampai tingkat terendah, kami merasa ada benang merah yang terputus. Jadi, tidak bisa di tingkat kabupaten bagus tapi di tingkat masyarakat desa tidak berjalan," ujar Ekki.

Penguatan kelembagaan yang dimaksud Ekki bertujuan untuk mengkolaborasi lima potensi penting yang dia sebut dengan 5M, yaitu *Man* (SDM), *Money* (uang atau dana), *Machines* (mesin atau fasilitas), *Method* (metode atau prosedur), dan *Materials* (bahan baku). Jika komunikasi antar individu dan kelembagaan kuat, Ekki yakin potensi 5M akan disatukan.

Seiring kegigihan Pokja, Ekki mengaku anggaran terus mengalami peningkatan signifikan. Tren peningkatan anggaran ini mulai terlihat cukup meningkat sejak tahun 2011. Sebelumnya, mereka pernah hanya mempunyai anggaran beberapa juta rupiah saja. Kemudian, anggaran perlahan meningkat menjadi Rp 100-an juta, lalu Rp 300-an juta, dan sekarang mereka mengelola hampir Rp 1 miliar. "Kesling yang dulu dianggap anak tiri kini menjadi anak emas," ujar Ekki.

Peningkatan anggaran juga disebabkan komunikasi intensif antara eksekutif dan legislatif. Komunikasi dua lembaga ini juga dilakukan dalam forum *ngadu bako*. Cara ini terbukti mempererat semua pihak. "Forum *ngadu bako* terbukti efisien karena tidak perlu menggelar pertemuan formal yang membutuhkan anggaran besar. DPRD sangat mendukung, terbukti dengan anggaran yang terus meningkat, terutama sejak tahun 2010," jelas Ekki.

Komunikasi intensif, baik informal maupun formal, antara eksekutif dan legislatif juga dipraktikkan di Ende. Komunikasi dua lembaga ini, akhirnya mampu melahirkan peraturan daerah (Perda) terkait air minum dan sanitasi. Dalam prosesnya, Perda ini lahir atas inisiatif DPRD.

### Sinergi Pemerintah, Adat, dan Agama

Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam menyukseskan misi peningkatan akses air minum dan sanitasi. Tugas mulia ini bisa lebih mudah diselesaikan jika melibatkan para tokoh informal seperti tokoh adat dan tokoh agama. Sebab, mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Di Ende, ada istilah "Tiga Tungku Batu" yang merujuk pada tiga elemen ketokohan yaitu tokoh agama, adat, dan pemerintah. Tokoh adat, biasa disebut "Mosalaki", dianggap sebagai figur yang harus ditaati. Mosalaki tak hanya mengatur acara adat, tapi juga urusan sosial. Di sejumlah desa, Mosalaki sering merangkap sebagai kepala desa.

> "Di Ende, ada istilah "Tiga Tungku Batu" yang merujuk pada tiga elemen ketokohan yaitu tokoh agama, adat, dan pemerintah."

Peran tiga tokoh simpul membuat sejumlah desa di Ende mampu deklarasi STBM meski desa-desa itu kesulitan air. Contoh desa-desa yang mampu deklarasi walaupun

terkendala air adalah Desa Tiwerea, Kecamatan Nangapanda; Desa Golulada, Kecamatan Detusoko; dan Desa Ndetundora, Kecamatan Nuabosi. Bahkan seluruh desa di Kecamatan Pulau Ende mampu deklarasi STBM sejak 2012.

Mereka mampu deklarasi STBM di tengah keterbatasan. Warga Desa Tiwerea milsanya, mereka hanya mengandalkan Penampungan Air Hujan (PAH) untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Jika musim kemarau, warga harus berjalan beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Perjuangan mereka mendapatkan air tidak mudah, mengingat medan yang cukup berat dan curam. Namun, keterbatasan ini tidak menjadi halangan bagi warga Tiwerea untuk berperilaku *higiene*. Setiap rumah telah memiliki jamban sehat, dan juga tersedia air dan sabun sekaligus tempat sampah.

Pelibatan tokoh agama juga terlihat di Banjar Tunggalsari, Tabanan, Bali. Dalam pengelolaan bank sampah misalnya, mereka melibatkan tokoh masyarakat seperti guru, ibu-ibu posyandu, majelis taklim, dan pedagang. Pembauran seperti ini membuat informasi dan kebijakan lebih mudah diteruskan ke masyarakat bawah. Ada juga kelompok kecil (Pokcil), yang melibatkan anak-anak SD, untuk mengumpulkan sampah sehingga mereka punya tabungan. Dalam umat Hindu, agama yang dianut mayoritas warga Tabanan, ada konsep Tri Hita Karana yang memuat tiga prinsip penting, diantaranya menjaga hubungan manusia dengan lingkungan.

Di Nusa Tenggara Barat, para da'i (penceramah) pun tidak ketinggalan turut mendakwahkan pentingnya BAB pada tempat-nya. Tentu saja, sangatlah mudah mencari dalil (dasar normatif) di setiap agama tentang kewajiban menjalani hidup sehat dan bersih. Ajaran agama pun sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang menganut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengurus KSM Dabagsari Makmur, Kota Solo.

Foto: Pokja AMPL Nasional

# 4 Dari Masyarakat untuk Masyarakat

Potensi masyarakat cukup besar, mereka bersedia dan mampu mendukung sektor air minum dan sanitasi.

MOCHAMMAD NATSIR
*Direktur Pengembangan Air Minum Kementerian PU-Pera*

Tidak semua program air minum dan sanitasi dikelola pemerintah. Ada program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang memberikan peran penting kepada masyarakat dalam menjalankan program sekaligus memelihara fasilitas dan aset yang dimiliki. Program yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat mempunyai tantangan yang berbeda dibandingkan dengan program yang dijalankan pemerintah. Perlu kepercayaan masyarakat untuk menjamin program dan kegiatan dapat berjalan. Para pengurus atau pengelola pun sewaktu-waktu

harus siap jika mereka dimintai pertanggungjawaban. Contoh kelompok masyarakat yang mengelola fasilitas air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sanitasi dan HIPPAMS (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi).

### Memperjelas Kewenangan Pengurus

Pengurus menjadi tulang punggung kelancaran program air minum dan sanitasi. Di KSM Dabagsari Makmur, yang berada di RW 023, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo misalnya, kepengurusan terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris, dan bendahara. KSM Dabagsari mengelola fasilitas MCK umum, IPAL Komunal, dan pembayaran air PDAM.

Sebelum ada KSM Dabagsari, banyak warga yang tidak mempunyai jamban. Hanya ada satu fasilitas MCK umum yang dipergunakan oleh warga dari beberapa RT. Kala itu, fasilitas ini tidak mencukupi. Antrean panjang terjadi terutama di pagi hari. Akibatnya, banyak warga yang BAB di anak sungai Bengawan Solo di belakang kampung. Keluarga yang mempunyai jamban pun tidak bisa menjamin apakah jamban mereka sehat atau tidak.

Kemudian, munculah ide pembuatan KSM yang didukung oleh sejumlah pihak. Pendirian KSM ini tidak hanya menyediakan MCK umum sehat, namun juga membuat instalasi IPAL Komunal yang menampung limbah tinja dari semua keluarga. Sementara itu, warga yang belum punya jamban diberi jamban yang limbahnya terhubungkan dengan IPAL Komunal. KSM Dabagsari juga bekerja sama dengan PDAM setempat untuk mensuplai air minum, dimana tugas penagihan tarif bulanan dilakukan oleh KSM. Ada 99 KK yang menggunakan fasilitas PDAM di Dabagsari.

Kegiatan dan fasilitas KSM menjadi tanggung jawab ketua

yang dijabat oleh Ketua RT yaitu Derajat (46). Mereka dibantu Meri (36) dan Deni Suryadi (26) yang menjabat sebagai sekretaris dan bendahara dan bertugas mengecek pemakaian air PDAM sekaligus menarik tagihan setiap bulan. Sekretaris dan bendahara bertugas mengatur keuangan. Ketua bertanggung jawab memastikan semua berjalan lancar. "Warga yang pendapat mendapatkan jamban gratis dan menggunakan fasilitas IPAL komunal wajib membayar Rp 7.000 perbulan. Kami juga mengumpulkan uang pemakaian air setiap tanggal 5 hingga 10 setiap bulan. Kalau ada yang belum bayar di atas tanggal tersebut, maka Ketua RT yang menagihnya," tutur Deni.

Kini penarikan iuran, biaya pemakaian, hingga pengelolaan fasilitas berjalan dengan lancar tiap bulannya. Hal penting lain yang perlu dicatat adalah kesadaran warga pada lingkungan, khususnya pengolahan limbah tinja dan air meningkat. Rumah-rumah di Kampung Dabagsari yang umumnya sempit dan kecil sudah dilengkapi dengan jamban sehat. Lingkungan perkampungan juga tertata rapi dan bersih, walaupun ada sebagian warga masih buang sampah sembarangan di sungai.

Apa yang dilakukan warga Kelurahan Semanggi tampak sederhana. Tetapi, sebenarnya sosialisasi program air minum dan sanitasi di sana pernah mengalami kendala dalam waktu lama. Sebelum muncul kesadaran masyarakat, banyak penyuluh ditolak warga. Kala itu, mereka merasa sudah cukup dengan kebiasaan lama, yaitu BABS dan jamban yang tidak sehat karena tangki septik yang tidak standar. Namun, setelah beberapa warganya mengikuti pelatihan dan pemicuan, seperti yang pernah dilakukan Sugeng, penasihat kampung setempat yang kini menjadi penasihat KSM, semua kemudian berjalan lancar. Kesadaran untuk menjaga lingkungan sehat sesuai standar pun kini sudah berkembang dalam diri warga.

## Transparansi Pengelolaan Keuangan

Membangun kampung sanitasi di Semanggi, Solo, seperti disampaikan di atas, sungguhlah tidak mudah. Tetapi, yang jauh lebih sulit lagi adalah mempertahankannya. Menyadari hal tersebut, KSM sebagai organisasi masyarakat berusaha untuk mengelola semua program dan kegiatannya dengan pendekatan akuntabilitas dan bisnis untuk menjamin keberlangsungannya. Pendekatan ini diterapkan dengan menyediakan fasilitas yang bagus, terawat, dan bersih oleh para pengelola yang ceria dan bertanggung jawab.

Setiap warga harus bersedia mengeluarkan iuran yang disepakati untuk membiayai program dan kegiatan tersebut. Di KSM Dabagsari, setidaknya ada tiga sumber pemasukan yang bisa dikelola.

Pertama, penghasilan dari jasa pemeriksanaan meteran PDAM dan penagihan penggunaan air setiap bulan. Di Dabagsari, ada 89 KK yang semuanya berlangganan PDAM. Tarif yang harus dibayar pelanggan sebesar Rp 3.200 per meter kubik. Dari jumlah tersebut, Rp 3.000 per meter kubik diserahkan ke PDAM, sedangkan Rp 200 per meter kubik menjadi hak KSM.

Kedua, iuran jamban dari rumah tangga yang mendapatkan bantuan jamban sehat sebesar Rp 7.000 per bulan. Ada 48 KK yang menerima bantuan jamban sehat dan harus membayar Rp 7.000 setiap bulan. Ketiga, pendapatan dari fasilitas MCK umum. Penjaga MCK setiap hari harus membayar Rp 12.000 ke pengurus KSM. Jika jumlah pendapatan lebih, sisanya menjadi hak penjaga MCK yang setiap hari memelihara fasilitas publik tersebut.

Pendapatan dan pengeluaran setiap bulan tercatat dengan baik dalam buku bendahara. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan amanah seperti ini membuat program KSM berkesinambungan.

"Pendapatan bulanan yang diperoleh KSM dipergunakan untuk memperbaiki fasilitas jika ada kerusakan. Dana ini juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki instalasi PDAM sepanjang tidak mengalami kerusakan yang parah," kata Sugeng, yang pernah menjabat sebagai Ketua RT selama dua periode.

> "Pendapatan dan pengeluaran setiap bulan tercatat dengan baik dalam buku bendahara. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan amanah seperti ini membuat program KSM bisa berkesinambungan"

Kisah sukses pengelolaan KSM juga terlihat pada KSM Sanimas Indah Lestari, Banjar Tunggalsari, Tabanan, Bali. Dulu, Banjar Tunggalsari dikenal sebagai wilayah terkumuh di Tabanan. Saat itu, masyarakat masih terbiasa BABS. Ada beberapa rumah yang punya jamban tetapi tidak standar karena pembuangan langsung ke saluran air. Pada tahun 2006, sosialisasi Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) gencar dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, pertemuan ibu-ibu dan bapak-bapak.

Untuk meningkatkan akses sanitasi, pada 2007 dibuat satu unit IPAL Komunal yang melayani 56 KK. IPAL Komunal di kampung ini merupakan yang pertama di Tabanan. Pengelola IPAL Komunal ini terdiri dari 11 orang. Setiap KK dikenai iuran Rp 5.000 perbulan. Warga yang tidak mampu dibebaskan, tidak perlu membayar iuran. Dana hasil iuran diperuntukkan sebagai biaya operasional dan untuk membayar upah operator. Operator diberikan upah Rp 150.000 perbulan. Sisa uang iuran digunakan untuk uang kas dan uang siaga yang bisa dipergunakan sesuai kebutuhan. Selain dari iuran, KSM Indah Lestari terkadang mendapatkan dana dari Dinas PU, tamu, dan hibah. Semua dana

tersebut dimasukkan ke kas. Uang kas juga bisa digunakan untuk biaya perjalanan pengurus keluar kota mewakili KSM untuk menghadiri suatu pertemuan.

Suharsono, Sekretaris KSM mengatakan, para warga tidak keberatan dengan iuran tersebut karena sudah merasakan sendiri manfaat positif dari adanya IPAL Komunal. Manfaat positif yang terasa adalah lingkungan menjadi bersih dan masyarakat sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Keluhan anak-anak diare pun menjadi jarang sejak ada program ini.

> "Di awal program, ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan program ini. Namun, begitu berjalan dan merasakan manfaatnya, mereka pun mendukung."

Sejak tahun 2007 hingga sekarang, keberlanjutan program dan kegiatan yang dilakukan KSM Sanimas Indah Lestari perlu diacungi jempol. Pada tahun 2013, Banjar Tunggalsari dinobatkan sebagai lingkungan terbersih tingkat provinsi. Ketua KSM Sanimas Indah Lestari Buchori mengatakan, pencapaian ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan mereka, tapi juga merambah ke wilayah lain di dekatnya. Keberhasilan program mereka memicu wilayah lain untuk membuat program serupa. Kini, di Kabupaten Tabanan sudah ada 28 IPAL Komunal. Lalu, munculah ide untuk membuat AKSANSI (Asosiasi KSM Sanitasi seluruh Indonesia) di tingkat kabupaten, sebagai sarana saling studi banding.

Suharsono mengatakan, untuk mempertahankan prestasi yang ada perlu dukungan dari pengurus, pemerintah, dan masyarakat, seperti ketua adat, kepala desa, camat, semua turun langsung membenahi lingkungan. Dukungan berbagai pihak, tidak hanya berbentuk materi dan *non*-materi.

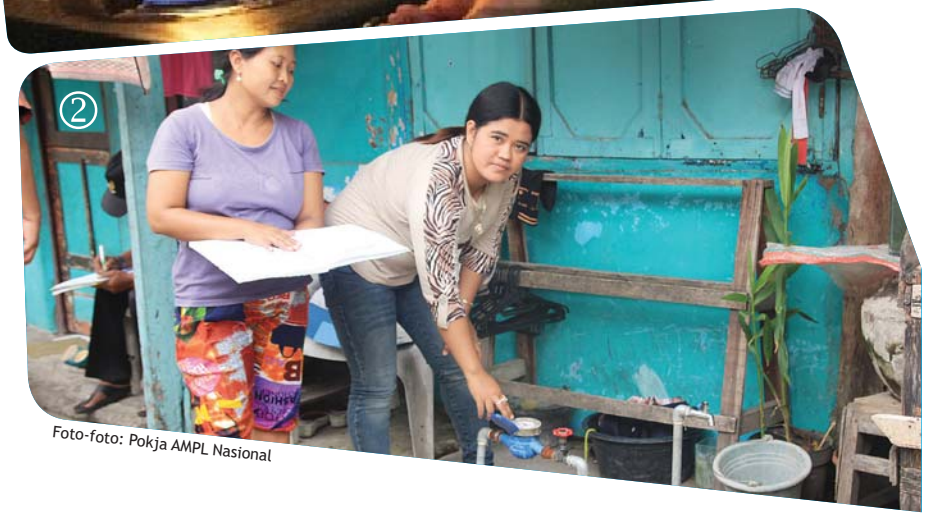


Foto-foto: Pokja AMPL Nasional

1. Gas hasil instalasi biogas dari kotoran manusia.
2. Pengurus KSM mencatat pemakaian air PDAM warga.

Foto: Pokja AMPL Nasional

Dari kiri-kanan : Koordinator fasilitator di Kecamatan Nangapanda, Camat Nangapanda, Kepala Desa Tiwerea, fasilitor.

# 5 Memaksimalkan Peran Fasilitator

Mengubah perilaku masyarakat sehingga mereka menjadi pelaku dalam pembangunan itu sangat tinggi nilainya.

ANDRINOF CHANIAGO
*Menteri PPN/Kepala Bappenas*

Jangan pernah meremehkan peran penyuluh dan fasilitator! Mereka adalah tokoh dalam pemicuan yang mampu menanamkan nilai-nilai pada masyarakat. Para penyuluh dan fasilitator bahkan mampu menggerakkan masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan akses sanitasi. Penilaian ini, misalnya, disampaikan oleh Bernad Idu, Camat Nangapanda, Kabupaten Ende. Bernad merasakan bagaimana para fasilitator dan pendamping mampu mempercepat deklarasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di dua desa yang ada di Kecamatan Nangapanda, yaitu Tiwerea dan Tendarea.

Bernad menyebutkan, peran fasilitator tidak hanya penting untuk memicu masyarakat, tapi juga menjaga keyakinan mereka untuk tetap melaksanakan lima pilar STBM. Setelah terpicu, masyarakat tetap membutuhkan fasilitator untuk memastikan program STBM berjalan dengan baik. "Kami berharap fasilitator tetap ada, walaupun desa sudah berhasil mendeklarasikan STBM," kata Bernad.

Menurut Bernad, di Kecamatan Nangapanda, saat melakukan pemicuan, fasilitator dibantu tim yang dibentuk oleh kecamatan. Tim tersebut terdiri dari beberapa pihak, antara lain kader PKK, sanitarian, kepala desa, Puskesmas dan perawat. Mereka bergerak ke desa-desa yang ada di Kecamatan Nangapanda.

Sementara itu, Plasidus Wodo, Ketua Tim Fasilitator di Nangapanda, menyebutkan, sebenarnya tidak sulit memicu masyarakat di Nangapanda, terutama di Desa Tiwerea dan Tendarea. Masyarakat desa umumnya sudah mengerti bahaya BABS. Namun, mereka perlu pendampingan untuk mewujudkan fasilitas sanitasi yang sehat. Pendampingan bukan berarti turut menyediakan dana pembangunan. Sebab masyarakat mampu membangun sendiri fasilitas dengan baik, walaupun dengan dana seadanya.

## Manfaatkan Lembaga Pendidikan

Semua pihak bisa terlibat untuk memicu masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan instansi strategis yang bisa didorong untuk memicu masyarakat. Dr. Sumihardi, Ketua Forum Komunikasi Jurusan Kesehatan Lingkungan (JKL) menyebutkan, lembaga pendidikan seperti JKL bisa dimaksimalkan untuk melakukan kampanye STBM. Bersama dosen lainnya, dia mendorong adanya kesepakatan untuk menyisipkan materi STBM ke dalam kurikulum tiga mata kuliah Politeknik Kesehatan (Poltekkes),

yaitu pemberdayaan, promosi kesehatan, dan dasar-dasar pemecahan masalah.

Dosen di Poltekkes Padang ini menyebutkan, tidak sulit menyisipkan materi STBM ke kurikulum Poltekkes karena STBM memiliki dasar hukum dari Kementerian Kesehatan RI, apalagi 5 pilar STBM sebetulnya juga termasuk mata kuliah keahlian. "Dengan dua alasan di atas, tidak sulit untuk membuat kesepakatan dalam Forkom JKL. Para dosen dan pendidik yang tergabung dalam forum ini berada di garda terdepan dalam menyukseskan sosialisasi STBM. Peran mereka semakin kuat mengingat ada ratusan ribu mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan yang siap terjun ke masyarakat," kata Sumihardi.

> "Pendampingan bukan berarti turut menyediakan dana pembangunan. Sebab masyarakat mampu membangun sendiri fasilitas dengan baik, walaupun dengan dana seadanya."

Kurikulum yang berisi sisipan STBM ini akan diadopsi oleh 30 sekolah yaitu 24 Poltekkes Kemenkes dan 6 kampus swasta anggota Forkom JKL pada semester genap 2015. Sementara untuk Poltekkes Padang, sisipan materi STBM sudah diajarkan sejak awal tahun 2014. Untuk mematangkan kemampuan peserta didik, mahasiswa akan mengikuti pembekalan selama tiga hari mengenai proses sampai masyarakat terpicu. Mereka tidak hanya dibekali teori, namun juga praktik pembekalan di luar kelas. "Seolah-olah mahasiswa adalah warga yang datang ke penyuluhan," jelas Sumihardi.

Sumihardi mengemukakan, selama ini kendala dalam penyuluhan yang sering dihadapi adalah mengumpulkan masyarakat, karena sulit menemukan waktu yang cocok. Misalnya, para warga memiliki waktu di malam hari, padahal daerahnya sulit ditempuh dan gelap. Tak jarang juga dilakukan

secara *door to door*. Kepala Jorong (kepala desa) sangat berperan dalam mengumpulkan masyarakat. Jika Kepala Jorong datang, masyarakat banyak juga yang datang. Kebanyakan yang datang justru kaum ibu, saat penyuluhan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) mereka sangat antusias. Penyuluhan biasanya diselingi dengan nyanyian dan stimulasi tali untuk mencairkan suasana. Saat penyuluhan materi CTPS, misalnya, tim membawa botol berkeran untuk praktik cuci tangan pakai sabun.

> "Aspek psikologis juga perlu diperhatikan saat penyuluhan. Tim tidak boleh memposisikan diri layaknya guru"

Sementara itu, Sekretaris Jurusan Poltekkes Palu, Andi Bungawati menyebutkan, setiap daerah mempunyai tantangan tersendiri dalam melakukan penyuluhan. Di Palu misalnya, masalah transportasi menjadi kendala sosialisasi STBM. Wilayahnya cukup sulit untuk transportasi. Bahkan, ada wilayah yang hanya bisa dilalui dengan berkuda. Namun demikian, selama ada transportasi, Andi siap membantu penyebaran informasi program STBM.

Dalam melakukan penyuluhan, Andi biasanya memulai dari 5 pilar STBM. Sasaran prioritas penyuluhan yang dilakukan Andi adalah SD (Sekolah Dasar). SD sengaja dipilih untuk memberikan pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak dini, sekaligus untuk membentuk pola pikir anak mengenai PHBS. Menurutnya, hal terpenting adalah pemahaman dan penyadaran untuk diri sendiri terlebih dahulu. Jika sudah memahami dan menyadari pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, selanjutnya ia bisa menularkannya ke masyarakat.

Beruntung, Andi tidak merasa kesulitan untuk menyosialisasikan ke anak-anak karena biasanya pihak SD sudah memiliki media sosialisasi berupa tayangan singkat. Jadi,

apa yang dilakukan Andi dan tim lebih pada penguatan. Aspek psikologis juga perlu diperhatikan saat penyuluhan. Tim tidak boleh memposisikan diri layaknya guru. Ketika datang ke suatu tempat, Andi dan tim berusaha menyatu dengan masyarakat sehingga memahami kebutuhan mereka. Dia mendekati mereka secara pelan-pelan. Jika di SD, misalnya, tim menunjukkan contoh mencuci tangan pakai sabun. Anak-anak pun bertanya mengapa harus pakai sabun. Dari situlah Andi dan tim bisa menjelaskan pelan-pelan. Melalui proses pembelajaran, tim penyuluh menanamkan pentingnya mencintai STBM.

Di level perguruan tinggi, Andi dan tim juga menggerakkan mahasiswa untuk terlibat penyuluhan dan mendukung program STBM. Caranya, ia berbicara langsung kepada mahasiswa, memasang spanduk atau menempelkan *pamflet* mengenai informasi program STBM. Persoalannya, tidak semua orang tahu dan mengerti apa itu STBM. Keterbatasan informasi kerap menjadi penghambat pemicuan. Karena itu, kampus perlu dijadikan sumber informasi bagi program STBM.

Foto: Pokja AMPL Nasional

Novian Dany Indrawan (pakai kaos), pemilik usaha penyedotan tinja "Daffa Jaya" bersama Setiawan, Manajer "Daffa Jaya".

# 6 Kreatif Membangun Bisnis Sanitasi

*Entrepreneurship* adalah *mindset*,
bukan profesi.

SANDIAGA S UNO
*Pengusaha Muda*

Kehadiran para wirausahawan sanitasi sangat penting guna mempercepat peningkatan akses. Mereka tidak hanya menyediakan barang yang berhubungan dengan fasilitas air minum dan sanitasi, namun juga jasa di sektor tersebut. Ada sejumlah jasa yang sangat dibutuhkan untuk penyehatan lingkungan, antara lain jasa pembuatan jamban dan tangki septik serta jasa penyedotan tinja.

Saat ini, bisnis di sektor sanitasi belum banyak dilirik. Jorok, hanya dilakukan oleh orang yang terpaksa, dan tidak mempunyai prospek bagus merupakan kesan yang sering diberikan kepada para pengusaha sanitasi. Penyediaan jamban dan tangki septik misalnya, jasa ini sering dianggap tidak prospektif karena sarana

ini biasanya sudah dibangun sekaligus saat pembangunan rumah. Sementara itu, di daerah yang masyarakatnya terbiasa buang air besar sembarangan (BABS), pembangunan jamban dan tangki septik bukanlah peluang bisnis yang menggiurkan.

Namun, tantangan dari masyarakat seperti itu justru menunjukkan sisi penting wirausahawan sanitasi. Perlu dicatat bahwa para wirausahawan di sektor ini tidak hanya menjual, tapi juga mengedukasi masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya, mereka mengedukasi masyarakat agar berubah ke perilaku bersih. Mereka pun tak menyerah menawarkan pembangunan jamban sehat dan sedot limbah tinja secara berkala. Ketika edukasi itu berhasil, dan kesadaran masyarakat tumbuh, bisnis ini pun berkembang dengan baik.

### *Rebranding* Bisnis Sanitasi

Bisnis penyedotan tinja seringkali dianggap jorok sehingga tidak banyak yang tertarik. Namun, Agung Prasetyo (23) dan Novian Dany Indrawan (43), dua pengusaha sedot tinja asal Kota Solo, berhasil mengubah *image* atau *brand* bisnis ini menjadi bisnis menggiurkan, semenarik keuntungan yang mereka peroleh. Agung adalah lulusan STM yang sebelumnya pernah bekerja di pabrik. Dia tertarik pada usaha sedot tinja karena yakin usaha ini bisa memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan pekerjaannya sebagai karyawan. Kehadiran Agung secara tidak langsung mengubah *image* bisnis sedot tinja yang sebelumnya tidak dilirik anak muda menjadi pekerjaan yang tidak boleh dipandang remeh.

Agung mengakui, bisnis ini mempunyai prospek cerah, seiring pembangunan perumahan yang masif di Solo. Dia yakin untuk beralih profesi menjadi penyedot tinja. Ketika hendak memulai bisnis, Agung meminta modal sekitar Rp 150 juta untuk membeli

kendaraan tangki dan alat penyedot tinja. Awalnya, orangtuanya tidak mengizinkan. Alasannya, bisnis ini dinilai tidak mempunyai prospek bagus. Keyakinan ini diperkuat dengan tangki septik di rumah orangtuanya yang sejak 30 tahun tidak pernah disedot. Namun Agung tetap gigih meyakinkan orangtuanya. Akhirnya orang tua Agung setuju dengan niat usaha anaknya tersebut.

Sementara Dany, yang lama malang melintang di dunia bisnis, telah mempunyai naluri bahwa bisnis ini memang menjanjikan. Dia membuat usaha sedot tinja dengan merek usaha "Daffa Jaya". Sebelum terjun ke bisnis ini, Dany dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang konveksi batik dan kuliner. Dia tahu cara mengemas bisnis menjadi indah seperti banyak bisnis yang dia geluti sebelumnya. Sebagai pebisnis, Dany seakan menunjukkan pada khalayak ramai bahwa bisnis ini memang menggiurkan.

"Mereka harus melakukan beberapa inovasi agar bisnis ini benar-benar terlihat "bersih" dan menjanjikan."

Sosok muda dan pengusaha sukses yang terlihat pada diri Agung dan Dany belum cukup untuk mengubah citra bisnis sedot tinja. Mereka harus melakukan beberapa inovasi agar bisnis ini benar-benar terlihat "bersih" dan menjanjikan. Usaha Agung dan Dany untuk mengubah citra bisnis sedot WC dimulai dengan cara mempercantik truk tangki mereka. Agung mengecat truk tanki dengan warna biru bersih. Tidak ada noda pada truk Agung sebagaimana truk tangki penyedotan tinja pada umumnya. Sementara itu, Dany menghiasai tangkinya dengan motif batik agar sesuai dengan karakter Solo sebagai Kota Batik. Dalam melayani pelanggan, Agung dan Daffa menjaga penampilan. Dia ingin para pelanggan mengetahui bahwa mereka berhadapan dengan pekerja profesional.

Dany juga memberikan seragam khusus kepada para operator mereka di lapangan. Para konsumen pun mengenal operator penyedotan tinja Daffa, setidaknya melalui penampilan mereka. Keterlibatan Dany yang mendirikan Daffa Jaya juga membuktikan bahwa bisnis ini bisa dikelola dengan cara profesional dan bersih. Dany yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha konveksi, bisnis yang lekat dengan keindahan, kini mampu mengubah citra sedot tinja menjadi bisnis yang bersih dan indah. Sebagai mantan pegawai bank, Dany mengetahui bahwa penampilan karyawan sangat penting untuk menjaga dan menarik konsumen.

## Layanan Prima pada Konsumen

Konsumen adalah raja. Prinsip ini dipegang teguh oleh para pengusaha sanitasi seperti Agung dan Dany. Mereka menjamin bahwa jasa mereka maksimal. Agung dan Dany memberikan garansi kepada konsumen bahwa tangki septik pelanggan akan benar-benar kosong sesudah disedot. Jika dalam beberapa hari tangki septik mereka mampet lagi, Agung dan Dany siap menyedot kembali. Namun hingga saat ini, tidak pernah ada komplain dari konsumen. Suatu kali, Agung pernah mendapat komplain dari konsumen, dan terpaksa Agung menyedot kembali. Namun setelah diteliti, rupanya masalah bukan berasal dari masih adanya lumpur atau tinja di dalam tangki septik, tapi karena sebab lain. Konsumen pun memperbaiki instalasi jambannya.

Untuk memastikan bahwa semua lumpur tinja tersedot, Agung maupun Dany memodifikasi cara kerja peralatan mereka. Jasa penyedotan tinja umumnya meletakkan alat penyedot di antara truk tangki dan tangki septik rumah. Cara ini kadang membuat tidak semua lumpur dan kotoran yang ada di tangki septik bisa terangkut ke truk tangki, sehingga menyisakan kotoran di dalam tangki septik. Hal ini bisa membuat tangki septik kembali penuh

dalam waktu singkat. Agar kejadian ini tidak terjadi, Agung dan Dany meletakkan pompa penyedot di belakang tangki truk. Jadi, komposisi letaknya yaitu tangki septik, lalu selang penyedot, langsung melewati tangki tanpa melewati pompa penyedot karena mesin penyedot diletakkan setelah tangki truk. Cara ini mampu membuat tangki septik bersih dari tinja dan kotoran lain.

Agar layanan kepada pelanggan terjamin, Agung dan Dany mempunyai prosedur standar operasional (*Standard Operating Procedure*/SOP). Layanan ini diperkuat dengan layanan telepon yang bisa dipergunakan konsumen untuk pemesanan dan komplain jika ada keluhan. "Ada profit besar di bisnis sanitasi. Jika ada tiga order saja per hari, setiap bulan akan mendapat omzet Rp 15 juta per bulan, dihitung dari Rp 200.000 x 3 x 25 hari saja. Biaya operasional sekitar 50 persen dari omzet," ujar Agung yang baru memulai usaha pada awal 2014 dan kini sudah berencana menambah truk dari satu menjadi dua.

"Pelanggan Agung tidak hanya rumah tangga, tapi juga sekolah, hotel, pabrik, dan bahkan kantor pemerintah. Ada beberapa hotel dan pabrik yang rutin melakukan penyedotan"

Pelanggan Agung tidak hanya rumah tangga, tapi juga sekolah, hotel, pabrik, dan bahkan kantor pemerintah. Ada beberapa hotel dan pabrik yang rutin melakukan penyedotan menggunakan jasa Agung. Untung besar juga diperoleh Dany yang memulai bisnis sedot tinja sejak tahun 2012. Untuk operasional, dia menggandeng Setiawan yang lama bekerja di salah satu penyedia jasa sedot tinja di Solo. Pada awal usaha, Dany hanya menargetkan penyodotan sebanyak dua kali dalam sehari. Kini, target itu sudah dilewati. Dari satu truk tangki, Dany kini memiliki tiga truk tangki (satu truk belum beroperasi).

Foto-foto: Pokja AMPL Nasional

Agung Prasetyo di atas truk sedot tinja milikinya dan sedang memperaktikkan cara menyedot tinja.

Dengan dua mobil saja, Dany berhasil menyisihkan keuntungan bersih Rp 15 juta per bulan. Untuk operasional, Dany kini memiliki enam karyawan, terdiri dari dua operator telepon dan empat karyawan di lapangan.

Foto: Budi Darmawan

Warga atau yang biasa dipanggil Edo, wirausahawan sanitasi asal Desa Ponggang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat.

## Ulet Memicu Calon Konsumen

Contoh pengusaha kreatif dalam bisnis sanitasi tidak hanya tercermin pada Agung dan Dany. Ada banyak pengusaha lain yang juga ulet menjadikan bisnis sektor ini sebagai sendi ekonomi

> Jika ada warga yang tidak mempunyai jamban, dia bertanya bagaimana jika ada tamu penting datang ke rumah, apakah tamu diminta untuk BAB di sawah dan ladang?

mereka. Salah satunya seorang yang bernama Warga (45) asal Desa Ponggang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat, yang biasa disapa Edo.

Edo memulai usahanya sejak tahun 2012. Bisnis yang dirintis Edo tidak mudah, sebab saat itu masyarakat masih terbiasa BABS. Lahan kosong masih luas. Edo menyadari, di satu sisi jumlah masyarakat yang masih BABS merupakan tantangan, namun di sisi lain fenomena banyaknya orang yang tidak memiliki jamban membuat Edo yakin bisnis yang dia geluti akan berhasil. Masyarakat yang BABS adalah peluang pasar yang sangat besar. Edo menawarkan jamban secara *door to door*. Jika ada warga yang tidak mempunyai jamban, dia bertanya bagaimana jika ada tamu penting datang ke rumah, apakah tamu diminta untuk BAB di sawah dan ladang? Jika warga mempunyai anak gadis, Edo bertanya bagaimana jika anak gadisnya diintip pria saat BABS di ruang terbuka?

Berbagai upaya pemicuan dilakukan Edo agar warga sadar. Dan, pemicuan Edo berhasil, banyak warga kemudian pesan jamban kepadanya. Dia pun rela membangun jamban di rumah warga, walaupun jaraknya jauh dan medan perjalanannya sulit. Akses jalan di Kecamatan Serangpanjang memang tidak mudah. Banyak jalan berliku dan menanjak serta tidak rata karena banyak yang belum diaspal. Namun, Edo rela membawa jamban dan peralatan pembangunan dengan motornya ke tempat tujuan. "Sekarang saya hanya bertumpu pada bisnis pembangunan jamban sehat. Saya harus kerja keras, sebab jika tidak kerja keras akan berpengaruh pada perekonomian tetangga," kata Edo, yang

kini sering diminta ceramah hingga ke kabupaten lain seperti Garut, Bandung, dan lainnya.

Edo menyebut usahanya dengan nama "Sanitasi Masyarakat Ponggang, Serangpanjang, Subang" (SAMPO SS). Dia menawarkan paket murah sesuai kemampuan warga. Ada empat tipe, yang dia sebut dengan empat SMP (Sanitasi Masyarakat Ponggang). Ada SMP I seharga Rp 1,5 juta, SMP II seharga Rp 1,4 juta, SMP III seharga Rp 1,3 juta, dan SMP IV seharga Rp 1,25 juta. Keuntungan yang didapat lumayan besar, mulai Rp 150 ribu hingga Rp 400 ribu per SMP.

Setiap bulan, Edo mampu melayani pelanggan antara 20-50 paket. Ini juga berarti ada sekitar 20-50 KK yang mampu dipicu oleh Edo. Jika per satu paket Edo mendapatkan keuntungan Rp 250 ribu, dan per bulan ada 30 pelanggan, maka setiap bulan dia mengantongi keuntungan sebesar Rp 7,5 juta. Edo tidak segan-segan memberikan garansi kepada konsumen. Edo berani memberikan jaminan hingga satu tahun untuk meyakinkan bahwa jamban dan tangki septik yang dia bangun sangat kokoh dan berfungsi dengan baik.

Kini, pelanggan Edo tidak hanya sebatas Kecamatan Serangpanjang, melainkan kecamatan lain di Subang bahkan hingga lintas kabupaten. Edo bekerjasama dengan para sanitarian dari Puskesmas yang dia jadikan agen. Ada pembagian keuntungan antara sanitarian dan Edo jika ada "proyek" pembangunan jamban sehat.

Foto-foto: Wahana Visi Indonesia

1. Bilik jamban sederhana di Desa Manda, Kecamatan Bugi, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
2. Modifikasi jamban oleh warga Desa Manda, Kecamatan Bugi, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

# 7 Inovasi Sarana Sanitasi

Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut.

STEVE JOBS
*Pendiri Apple*

Membuat masyarakat terpicu belum cukup untuk mengurangi perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Ketika sudah terpicu, masyarakat masih harus melengkapi rumah mereka dengan fasilitas sanitasi sehat. Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak sanggup membuat jamban sehat karena keterbarasan dana. Sementara di sejumlah daerah ada yang tidak bisa mengakses material. Pada kondisi ini, perlu peran inovator untuk membuat fasilitas sesuai kemampuan dan kondisi geografis sebuah daerah.

## Gunakan Bahan yang Terjangkau

Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat yang selama ini tidak mempunyai jamban adalah masyarakat golongan miskin. Agar

tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka, banyak pelaku air minum dan sanitasi melakukan inovasi, salah satunya Dokter Budi Laksono, peraih penghargaan MDGs *Award* 2013.

Melalui Yayasan Wahana Bakti, Budi, membuat "jamban amfibi". Ini merupakan teknologi tepat guna (TTG) yang cocok bagi masyarakat kurang mampu. Sebab, untuk membangun fasilitas ini cukup dengan dana sekitar Rp 270.000, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya dana yang dibutuhkan hanya Rp 180.000.

Pembangunan jamban murah ini hanya membutuhkan satu buah kloset, satu sak semen, pasir kurang lebih 15 ember, batu belah sekitar sepuluh ember, dan setengah lonjor besi beton. Jika tidak ada besi beton bisa diganti dengan batang bambu. "Tangki septik yang dibuat mempunyai diameter sekitar satu meter dan kedalaman satu setengah meter. Tangki septik tidak perlu diberi dinding semen karena tanah di beberapa daerah di Semarang cukup kuat untuk menyangga tangki septik," kata Budi.

> "Agar tangki septik lebih awet, masyarakat diminta untuk tidak membuang sabun ke dalam kloset"

Biaya murah juga disebabkan kloset langsung ditaruh di atas tangki septik sehingga tidak lagi memerlukan pipa saluran air. "Agar tangki septik lebih awet, masyarakat diminta untuk tidak membuang sabun ke dalam kloset," kata Budi, yang pernah bertugas di beberapa Puskesmas dan rumah sakit di Jawa Tengah tersebut.

Keberhasilan TTG milik Budi ini juga didukung oleh kondisi geografis dan struktur tanah di daerah yang dia temui. "Jika tanah tidak bisa menahan dinding tangki septik, maka akan ditambahkan semen untuk membuat dinding. Semen tambahan ini biasanya diperlukan untuk daerah yang tanahnya berair,"

tambahnya.

TTG milik Budi ini pertama kali diterapkan di sebuah dusun di Semarang pada pertengahan tahun 2004. Setelah sukses menerapkan program di dusun itu, dalam waktu singkat, lebih dari 15 dusun lainnya langsung menikmati manfaat serupa. Budi mengemukakan, teknologi ini sebenarnya sudah dikaji tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Di beberapa negara seperti Banglades dan India, konsep ini sekarang mulai diterapkan.

"Kami bukan kontraktor yang membangun jamban, namun kami memberikan pilihan jamban sehat dan murah untuk dipergunakan di daerah yang membutuhkan. Kami siap memberikan bimbingan dan informasi tentang pembangunan jamban sehat dan murah ini kepada siapa pun dan di mana pun"

Dengan TTG ini, kini Budi bersama yayasannya telah membangun sekitar 5.000 jamban sehat. Beberapa waktu lalu, ia mendapatkan dukungan pemerintah daerah untuk membuat 8.000 jamban sehat. "Kami bukan kontraktor yang membangun jamban, namun kami memberikan pilihan jamban sehat dan murah untuk dipergunakan di daerah yang membutuhkan. Kami siap memberikan bimbingan dan informasi tentang pembangunan jamban sehat dan murah ini kepada siapa pun dan di mana pun," jelas Budi.

### Manfaatkan Bahan Lokal

Model jamban sehat lainnya yang disesuaikan dengan kondisi daerah juga ditunjukkan oleh Yali Inggibal, fasilitator dari Wahana Visi Indonesia (WVI) yang bertempat tinggal di Desa Manda, Kecamatan Bugi, Jayawijaya, Papua. Masyarakat Desa Manda

> Abu tungku yang ada di dapur bisa dijadikan pengganti semen karena bisa mengeras dan kuat.

sudah terpicu untuk membangun fasilitas sanitasi sejak November 2013, namun mereka bingung bagaimana cara membuat jamban sehat. Maklum, di sana tidak ada semen dan kloset yang bisa mereka beli. Padahal, jamban sehat sebagaimana dalam bayangan mereka adalah bangunan kecil berdinding tembok dan dilengkapi dengan kloset dan tangki septik sebagaimana biasa mereka lihat di sekolah-sekolah pemerintah.

Di tengah mereka mencari solusi, Yali teringat abu tungku yang ada di dapur mereka. Menurut dia, abu tungku yang ada di dapur bisa dijadikan pengganti semen karena bisa mengeras dan kuat. Mulailah mereka merancang WC dengan cara dan model mereka sendiri. Untuk lantai WC, mereka menggunakan kerikil yang dicampur dengan abu tungku. Pengumpulan bahan lokal dilakukan selama seminggu. Bahan yang dikumpulkan adalah kerikil dari sungai untuk lantai WC, jagat dan lokop untuk dinding WC, seng dan pipa untuk tempat pembuangan (BAB), batu besar dan papan untuk dudukan saat BAB, kayu untuk kerangka, kayu balok, triplek serta jerigen. Semua bahan lokal ada di desa dan dapat mereka usahakan.

Setelah semua bahan terkumpul, dimulailah pembuatan rangka bangunan, menjemur bambu untuk lokop sebagai bahan untuk dinding WC, membuat dudukan WC dengan model jamban dua model plengsengan (menggunakan seng dan pipa) serta satu model cemplung, membuat atap dan membuat tutup WC. Setelah bangunan selesai, Yali dibantu oleh pendeta dan pemuda membuat *tippytap* yang ditempatkan di depan WC agar mudah cuci tangan pakai sabun saat keluar dari WC.

Foto-foto: Budi Laksono

1. Masyarakat sedang menggali tanah untuk membuat tangki septik untuk jamban amfibi.
2. Dokter Budi Laksono saat mensosialisasikan inovasi yang telah dilakukan.

Bagian III

# Strategi Sukses Kepemimpinan (*Leadership*)

1. Erna Purnawati, Kepala Dinas PU BMP Kota Surabaya.
2. Saluran air di Surabaya selalu bersih.
3. Satgas Pematusan melakukan normalisasi sungai.

Foto-foto: Pokja AMPL Nasional

# 8 Pemimpin yang Menggerakkan

Kuncinya adalah akuntabel dan transparan. Kalau mereka (masyarakat) tidak percaya, jangan harap ketika kita ajak, mereka akan mau.

Tri Rismaharini
*Walikota Surabaya*

Banyak kepala daerah yang menginspirasi masyarakat untuk melakukan perubahan. Karakter mereka yang sangat kuat, antara lain lugas, tegas, dan disiplin, menstimulasi perubahan dengan lebih cepat. Tentu saja, mereka tidak bisa bekerja sendirian, perlu dukungan banyak pihak (termasuk kepala SKPD dan staf) untuk memastikan semua program berjalan sesuai arah yang ditentukan.

Di Surabaya, ada Walikota Tri Rismaharini. Prestasinya segudang, yang paling menonjol antara lain sukses menggerakkan semua pihak untuk melakukan normalisasi sungai, saluran air,

hingga waduk (*boezem*) yang membuat Kota Pahlawan terbebas dari banjir. Kesuksesan Surabaya dalam mengelola banjir tidak lepas dari adanya komitmen kuat untuk menepati dan selalu meng-*update* rencana induk (*master plan*) drainase. Risma tidak sendirian. Sosok lain yang ada di belakangnya yaitu Erna Purnawati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan (DPUBMP).

## Kurangi Rapat, Perbanyak Kerja

Erna menjabat sebagai Kepala DPUBMP sejak tahun 2011. Kala pertama kali menjabat, Erna berhadapan dengan sungai dan saluran air yang penuh sampah dan lumpur. Sungai mengalami sedimentasi. Air hujan tidak bisa mengalir ke laut. Akibatnya, banjir terjadi di banyak titik kota. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah dan bangunan yang berdiri di sekitar dan di atas saluran air dan sungai.

“Agar perselisihan tidak terjadi atau minimal dikurangi, Erna meminimalisir rapat dengan warga. Kadang, tanpa pemberitahuan, Erna dan tim pematusan (terdiri dari PNS dan satuan tugas pematusan) langsung datang ke lokasi sungai dan melakukan pengerukan”

Bagi Erna, mengeruk lumpur di sungai yang dipenuhi bangunan liar tidak mudah. Sering terjadi perselisihan antara pemerintah dan warga yang menempati bangunan liar di atas sungai. Agar perselisihan tidak terjadi atau minimal dikurangi, Erna meminimalisir rapat dengan warga. Kadang, tanpa pemberitahuan, Erna dan tim pematusan (terdiri dari PNS dan satuan tugas pematusan) langsung datang ke lokasi sungai dan melakukan pengerukan.

Ada sebagian penghuni liar yang menerima bangunan

mereka ditertibkan, namun ada juga yang menolak. Erna tidak menyerah. Dia berdialog dengan mereka dan bertanya apa yang mereka inginkan. "Ada sejumlah penguni liar yang mengaku rela bangunannya dibongkar asal ada persetujuan dari tokoh agama di daerah setempat. Saya langsung mendatangi tokoh agama tersebut dan rupanya tokoh itu setuju dengan pembongkaran. Akhirnya, mereka tidak mempunyai alasan lagi kecuali ikut membantu pembongkaran," cerita Erna.

Selama ini, komitmen Walikota Risma dan jajarannya dalam memperbaiki Surabaya sudah diakui oleh masyarakat setempat. Tak heran, kebijakan dan program Pemkot Surabaya mendapatkan dukungan dari banyak warga. Dukungan yang besar ini memudahkan Pemkot untuk melaksanakan program mereka, serta mampu meredam "perlawanan" warga.

Penyelesaian masalah memang tidak bisa hanya dengan membicarakannya. Rapat, diskusi, dan musyawarah perlu untuk mencari solusi jitu, tetapi eksekusi jauh lebih penting. Dengan memperbanyak tindakan nyata, pada akhirnya warga dapat merasakan manfaatnya. Alih-alih melawan, warga justru turut serta membantu pemerintah.

### Kurangi Pekerjaan Berbasis Proyek

Masalah utama lain yang dihadapi Erna di awal masa jabatannya adalah tidak berfungsinya *boezem*. Enceng gondok memenuhi areal seluas 80 hektar *boezem* di seluruh Surabaya. Erna bertekad membersihkannya dalam waktu tiga bulan. Namun, dalam 2-3 minggu, enceng gondok seakan-akan tidak berkurang walaupun telah dibuang. Agar pekerjaan lekas selesai, Erna membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pematusan, terdiri dari warga yang diberi upah sesuai upah minimum regional (UMR) Kota Surabaya. Dia berkonsultasi dengan sejumlah instansi terkait tentang legalitas

Satgas, termasuk alokasi anggarannya. Alhasil, saat ini Surabaya mempunyai lebih dari 600 Satgas. Mereka bekerja di semua saluran air dan sungai. Jadi, tidak ada lagi proyek pengerukan *boezem*, sungai, atau saluran air. Semua kegiatan pengerukan dilakukan oleh Satgas secara berkala.

Erna mengaku, cara "proyek" memang disukai pejabat karena tidak perlu kerja keras, cukup diserahkan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaannya. Tetapi, proyek mempunyai banyak kelemahan. Proyek membutuhkan waktu lama karena harus melalui prosedur tender untuk setiap pekerjaan. Selain itu, kegiatan melalui proyek hanya mengerjakan satu titik dan waktu tertentu sesuai dengan kontrak. Jika lokasi kembali tersumbat, "proyek" tidak bisa mengerjakannya kembali. Sebaliknya, pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan Satgas sangat mudah. Satgas Pematusan bisa digerakkan sesegera mungkin ke lokasi yang diinginkan sesuai kebutuhan dan prioritas. Satgas bisa kerja di lokasi mana pun dan kapan pun tanpa terkendala dengan administrasi proyek, sehingga lebih efisien.

Bagi Satgas Pematusan, tidak ada hari tanpa mengeruk saluran air. Di Surabaya, sangat mudah ditemui Satgas masuk ke gorong-gorong. Mereka berani masuk saluran panjang yang tertutupi semen atau bangunan. Agar tetap aman selama mengerjakan tugas, ada teknik khusus yang mereka lakukan, yaitu terus bersuara atau bernyanyi untuk menandakan mereka tetap sehat saat berada dalam saluran.

Untuk mengundang warga ikut bekerja, Satgas melakukan *show of force* setiap hari Jumat, yaitu dengan membersihkan satu area tertentu secara bersama-sama. Cara ini mampu menarik minat warga Surabaya untuk melakukan hal serupa. Setiap minggu, selalu ada permintaan warga agar Satgas juga membantu membersihkan lingkungan mereka. Pemkot Surabaya

menverifikasi setiap permintaan dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Jadi, aktor utama pembersihan adalah warga. Jika dibutuhkan, Pemkot memberikan bantuan pengangkutan hingga peralatan. Satgas juga disiapkan untuk membantu.

> "Satgas Pematusan bisa digerakkan sesegera mungkin ke lokasi yang diinginkan sesuai kebutuhan dan prioritas. Satgas bisa kerja di lokasi mana pun dan kapan pun tanpa terkendala dengan administrasi proyek, sehingga lebih efisien"

Satgas Pematusan tidak hanya melakukan pembersihan saluran air dan *boezem*, tapi juga melakukan pembangunan *boezem* secara swadaya, tidak melalui proyek. Banyak kelompok warga, instansi pemerintah (seperti lembaga pendidikan dan lainnya), dan perusahaan swasta (seperti perumahan) rela menghibahkan lahan mereka untuk pembangunan *boezem* setelah menyadari fungsinya dalam mengurangi genangan air, terutama saat hujan.

Kerja Satgas terbukti efektif dan berhasil menfungsikan *boezem* di Kota Surabaya. Alhasil, kini seluruh *boezem* di Surabaya bisa terisi air tawar. Berbeda dari sebelumnya, di mana banyak *boezem* terisi air laut karena aliran air dari darat ke laut tidak berjalan, mengakibatkan air laut malah naik ke darat, terutama di dataran-dataran yang lebih rendah dari permukaan air laut.

Dalam melakukan sejumlah pekerjaan, DPUBMP tetap memerlukan pengerjaan melalui proyek. Namun, Erna tegas dalam bekerjasama dengan pihak pelaksana proyek, untuk menjamin kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Pada tahun 2013, ada lebih dari 160 perusahaan yang didenda karena tidak menyelesaikan pekerjaan proyek tepat waktu, dan ada 27 perusahaan yang di-*blacklist*. Semuanya dilakukan untuk memastikan kualitas kerja tetap sesuai kontrak yang sudah ditandatangani.

> Anggaran harus betul. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)-nya harus benar

### Tingkatkan Etos Pegawai

PNS di Surabaya, khususnya yang bertugas di bidang pematusan, bisa dijadikan contoh terjadinya perubahan etos kerja ke arah yang lebih baik. Menurut Erna, hal ini berbeda dari saat pertama kali ia menjabat pada tahun 2011, di mana ia kadang sulit mengetahui keberadaan pegawai dan para operator peralatan.

Erna masih ingat, kala itu banyak petugas terbiasa telat, bahkan tidak datang ke tempat kerja. Erna rela datang ke pangkalan *dump truck* untuk mengajak operator datang tepat waktu. Satu dua kali, para operator merasa keberatan. Namun, Erna tidak menyerah untuk terus mengingatkan. Tidak hanya mengingatkan, Erna selalu memberikan contoh langsung tepat waktu. Akhirnya, para operator pun terbiasa bekerja tepat waktu. Kini, pekerjaan bisa cepat selesai. Semua jadwal pun berjalan sesuai rencana. Saat ini, sangat mudah melihat etos kerja Satgas dan semua pegawai pematusan. Mereka bekerja tak kenal lelah. Bahkan, pada bulan Ramadhan, mereka rela bekerja usai shalat tarawih. Setiap tim tidak mau kalah dengan tim lain, dan menginginkan pekerjaan mereka menjadi yang terbaik.

Sementara itu Syamsul Hariadi, Kabid Pematusan menyebutkan, kerja Satgas terbagi dalam enam rayon. Ada 54 rumah pompa dan dilengkapi dengan 11 mesin pengangkut sampah. Semua operator giat bekerja, dan ini benar-benar terjadi di lapangan. Setiap tim mempunyai "ego" sendiri dan berlomba untuk menjadi yang terdepan. Mereka tidak mau ditegur. Bahkan, setiap rayon tidak ingin alat berat mereka dipinjam oleh rayon lain, sebab mereka ingin terus bekerja tanpa jeda. Tanpa

diminta, setiap rayon juga membuat tim kecil sendiri, seperti tim las untuk memperbaiki alat berat. Setiap tim selalu mempunyai insiatif guna menyelesaikan semua masalah yang ada di depan mereka. Erna selalu mendukung semua insiatif oleh stafnya.

### Rangsang Pegawai Kuasai Lapangan

Erna meminta semua pegawai, PNS maupun Satgas, mengerti dan menguasai masalah yang ada di wilayah tugas mereka. Jadi, para petugas di setiap rayon mengerti apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan setiap hari, terutama saat hujan akan datang. Teladan dari Erna dan Walikota Risma serta kontrol yang terus dilakukan membuat PNS dan Satgas merasa harus bisa menyelesaikan semua tugas. Mereka tidak ingin ada tugas yang terlewatkan. Sebab, jika itu terjadi, Erna maupun Walikota Risma tidak segan memarahi.

Menurut Erna, di antara situasi lapangan yang penting dikuasai adalah mengetahui apa saja kebutuhan yang mereka perlukan untuk menjalankan tugas. Semua kebutuhan harus dicantumkan pada rancangan anggaran secara terperinci, mulai dari kebutuhan linggis hingga pengamanan Polisi/TNI. Rincian anggaran juga perlu dijelaskan sesuai kebutuhan, tidak secara umum atau gelondongan. Misalnya, kebutuhan karung untuk mengangkat lumpur atau sampah dari saluran air harus jelas jumlahnya. “Saya minta jumlah dan kebutuhan disebutkan dengan jelas dalam anggaran. Misalnya, saat ini ada 600 Satgas. Jika setiap hari satu Satgas mampu mengangkat 15 karung, maka kebutuhan karung selama satu tahun yaitu 600 x 15 x 365. Anggaran harus betul. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)-nya harus benar,” jelas Erna.

①

Foto-foto: Pemprov Jatim

②

③

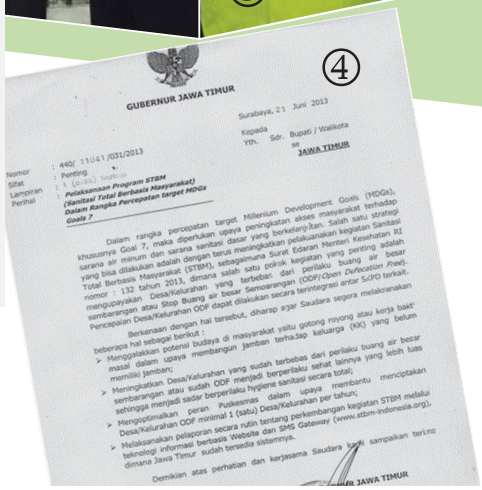

④

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 21 Juni 2013

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se-
JAWA TIMUR

Nomor : 440/ 11041 /031/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : ***Pelaksanaan Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Dalam Rangka Percepatan target MDGs Goals 7***

Dalam rangka percepatan target Millenium Development Goals (MDGs), khususnya Goal 7, maka diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sarana sanitasi dasar yang berkelanjutan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebagaimana Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor : 132 tahun 2013, dimana salah satu pokok kegiatan yang penting adalah mengupayakan Desa/Kelurahan yang terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan atau Stop Buang air besar Semoarangan (ODF/*Open Defecation Free*). Pencapaian Desa/Kelurahan ODF dapat dilakukan secara terintegrasi antar SKPD terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharap agar Saudara segera melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- Menggalakkan potensi budaya di masyarakat yaitu gotong royong atau kerja bakti masal dalam upaya membangun jamban terhadap keluarga (KK) yang belum memiliki jamban;
- Meningkatkan Desa/Kelurahan yang sudah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan atau sudah ODF menjadi berperilaku sanitasi secara total;
- Mengoptimalkan peran Puskesmas dalam upaya membantu menciptakan sehingga menjadi sadar berperilaku hygiene sanitasi secara total;
- Melaksanakan pelaporan secara rutin tentang perkembangan kegiatan STBM melalui Desa/Kelurahan ODF minimal 1 (satu) Desa/Kelurahan per tahun;
- teknologi informasi berbasis Website dan SMS Gateway (www.stbm-indonesia.org), dimana Jawa Timur sudah tersedia sistemnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima

GUBERNUR JAWA TIMUR

1. Deklarasi Bebas BABS di Kabupaten Madiun Jawa Timur.
2. Dari kiri ke kanan : Bupati Magetan, Walikota Madiun, Menteri Kesehatan, Bupati Ngawi, Bupati Pacitan (empat kabupaten telah deklarasi Bebas BABS).
3. Para kader pemantau bebas BABS di Kabupaten Magetan.
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang STBM.

# 9 Political Will

Kiat utama untuk menyelesaikan masalah ini adalah harus ada proses edukasi kepada pengambil keputusan agar mereka menyadari pentingnya pembangunan akses air minum dan sanitasi untuk berada pada prioritas yang tinggi.

DEDY S. PRIATNA
*Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas*

Di era otonomi daerah, komitmen politik (*political will*) pemimpin daerah sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Saat ini, sejumlah kepala daerah sudah mempunyai *political will* di sektor air minum dan sanitasi, hal ini tampak dari regulasi, program, dan keberpihakan. Kebijakan dan program mereka bermacam-macam, menyesuaikan daerah, kondisi, dan budaya masyarakat setempat.

## Dukungan Regulasi dan Anggaran

Regulasi dan anggaran menjadi dua sisi kebijakan yang saling mendukung. Adanya regulasi (biasanya berupa Perda) secara otomatis "mendongkrak" nilai anggaran untuk sanitasi. Contoh ini terlihat jelas di Kabupaten Ende (NTT), Kabupaten

Sumedang dan Kota Cimahi (Jawa Barat), serta sejumlah daerah lain termasuk di tingkat provinsi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB).

> Merupakan sebuah kezaliman jika kita tidak membantu masyarakat untuk mendapatkan air minum dan sanitasi

Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda NTB Saharudin menyebutkan, NTB mengambil langkah strategis untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dengan menggeser konsentrasi pembangunan dari yang selama ini terfokus pada pembangunan jalan dan jembatan ke arah pembangunan sarana air minum dan sanitasi lingkungan. "Dalam RPJMD I, konsentrasi Pemprov NTB ditujukan pada pembangunan infrastruktur dan jembatan. Pada RPJMD II, titik tekannya bergeser pada air dan sanitasi. Ada dana Rp 450 miliar disediakan dalam APBD dengan skema tahun jamak (*multiyear project*)," tutur Saharudin. Dana tersebut digunakan untuk, antara lain, pembelian truk tangki air, kantong-kantong air serta sumur bor. Sedangkan untuk program sanitasi dialokasikan Rp 20 juta per daerah untuk membangun jamban di berbagai titik.

Saharudin menyebutkan, Gubernur NTB sangat prihatin dengan kondisi warganya yang hidup dengan air serba terbatas. Gubernur NTB menetapkan, masalah air di NTB harus tuntas pada 2018, tahun terakhir jabatannya. "Merupakan sebuah kezaliman jika kita tidak membantu masyarakat untuk mendapatkan air minum dan sanitasi," kata Hanafi, mengutip ucapan Gubernur NTB M. Zainul Majdi.

Sementara itu, di Jawa Timur (Jatim), *political will* berupa dukungan anggaran dilakukan dengan cara memunculkan kode rekening khusus untuk STBM dalam pendanaan APBD Provinsi. Dana khusus STBM bisa diakses kabupaten/kota dari APBD

Pemprov Jatim. Gubernur Jatim juga telah membuat surat edaran kepada semua bupati/walikota tentang STBM dan strategi yang bisa dilakukan, termasuk Gerakan Gotong Royong.

Melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Pemprov Jatim melakukan advokasi mendalam terhadap kepala daerah tentang pentingnya STBM, dengan harapan mendapat dukungan penuh (politik, kebijakan, dan pendanaan) dari Pemda setempat. "Dukungan bupati/walikota sangat penting. Diakui, masih ada bupati di Jatim yang tidak mendukung program STBM. Bahkan ketika ada deklarasi ODF di sebuah desa, kepala desa tidak bisa mengundang bupati karena untuk mendatangkan bupati perlu biaya," kada Edy Basuki, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tanpa menyebut kabupaten yang dimaksud.

### Jadikan Air Minum dan Sanitasi sebagai Isu Seksi

Menurut Edy Basuki, ada sejumlah trik agar isu air minum dan sanitasi menjadi perhatian bupati dan walikota. Setiap ada acara, baik di tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan yang diikuti oleh pejabat Pemprov, ada "bisikan" yang disampaikan kepada pengisi acara (baik itu pembawa acara atau pemberi sambutan) agar membicarakan pentingnya akses air minum dan sanitasi.

Pemprov Jatim, menurut Edy, sering terjun langsung ke lapangan dan membuat program yang bisa diterapkan oleh dinas atau pemerintahan di bawahnya. Edy mencontohkan, dia mempunyai program yang menyasar siswa-siswa SD dengan bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru untuk melakukan pemicuan melalui siswa. Para guru mensurvei rumah siswa yang belum mempunyai jamban. Jika ada siswa yang rumahnya tidak dilengkapi jamban, maka rumah itu akan didatangi pejabat untuk bertamu. "Guru kemudian meminta kepada siswa agar

menyambut tamu tersebut di rumah. Salah satu permintaan tamu terhormat tersebut adalah disediakan jamban agar mereka tidak repot ketika akan BAB. Karena permintaan inilah, mau tidak mau, siswa meminta orangtuanya untuk membuat jamban, dan biasanya langsung dikabulkan," cerita Edy.

> "Ada komitmen bersama secara tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program ini, yang diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran dan lainnya"

Menjadikan air minum dan sanitasi sebagai isu bersama juga disampaikan oleh Julius Honesti, Kepala Bidang Sosial-Budaya Bappeda Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Julius, Pemprov Sumbar meyakinkan 19 kabupaten/kota di Sumbar untuk menjadikan isu ini sebagai isu utama. Seiring perjalanan waktu, semakin banyak kabupaten/kota yang memberikan perhatian besar pada isu air minum dan sanitasi . Hal ini tampak dari semakin banyaknya Pokja AMPL yang terbentuk. Pada tahun 2004, hanya ada empat Pokja AMPL di Sumbar, namun pada tahun 2013 semua kabupaten/kota telah memiliki Pokja AMPL. "Pada tahun 2011, ada komitmen bersama secara tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program ini, yang diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran dan lainnya," kata Julius.

Dalam setiap pertemuan dengan kepala daerah kabupaten/kota, Gubernur Sumbar memperlihatkan capaian yang sudah diraih oleh setiap kabupaten/kota. Capaian itu antara lain IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang salah satu indikatornya adalah pembangunan air minum dan sanitasi. Menurut Julius, saat ini akses air minum di Sumbar sudah mencapai 70 persen, sedangkan akses sanitasi layak sebesar 56 persen.

Tak ketinggalan, menggemakan isu air minum dan sanitasi juga dilakukan oleh Pemprov NTB, salah satunya dilakukan dengan "menitipkan" isu ini kepada para penceramah agama. Dalam berbagai pengajian dan tabligh akbar, para penceramah memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan informasi seputar air minum dan sanitasi kepada para jamaah dan masyarakat luas.

### Jadikan Sanitasi sebagai Indikator Penting

Cara lain untuk memperkuat perhatian kepala daerah pada sektor air minum dan sanitasi adalah dengan membuat penghargaan, di mana salah satu indikatornya yaitu akses air minum dan sanitasi. Cara seperti ini juga sudah dilakukan di Jatim. Setiap tahun, Pemprov Jatim bersama surat kabar *Jawa Pos* menggelar *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi*/JPIP. Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jatim. Salah satu penilaian yang diperhatikan untuk mendapatkan penghargaan JPIP adalah akses sanitasi.

Rangsangan tidak hanya diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, melainkan hingga tingkat desa. Caranya, dengan pemanfaatan dan sinergi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Desa yang hendak mendapatkan dana untuk Pamsimas harus membuat "surat pernyataan sanggup bebas BABS". Pembangunan sarana perpipaan yang akan dilaksanakan Kementerian PU-Pera di suatu desa dianggap sebagai *reward* karena desa sanggup bebas BABS.

Syarat bebas BABS juga harus dipenuhi setiap desa/kelurahan jika suatu kota ikut dalam program Kota Sehat maupun lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS). Lokasi yang diunggulkan harus sudah bebas BABS. Apabila belum bebas BABS, maka dianggap belum memenuhi syarat.

Foto : Pokja AMPL Nasional

Persampahan, salah satu masalah yang perlu diselesaikan dengan melibatkan banyak tokoh.

# 10 Mendelegasikan Kewenangan

Tugas pemimpin yang utama adalah bagaimana menggerakan *team work* agar semua pekerjaan bisa diselesaikan secara maksimal baik kualitas dan kuantitasnya, serta selalu tepat waktu.

HASNUL SUHAIMI
*CEO PT XL Axiata*

Para pemimpin tidak bisa bekerja sendiri, dia harus mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pihak lain. Jika pendelegasian ini berhasil, tugas dan beban pemimpin akan semakin ringan. Cara ini pernah dilakukan Josrizal Zain saat memimpin Kota Payakumbuh Sumatera Barat (2002-2012).

Josrizal pernah dijuluki "walikota jamban" karena prestasinya di sektor sanitasi. Salah satu masalah yang pernah dihadapi Josrizal pada awal masa jabatannya adalah kondisi pasar yang kumuh dengan sampah berserakan. Di pasar, ada orang-orang yang memperjualbelikan lapak sehingga tidak teratur. Pada awalnya, Josrizal mengalami kesulitan untuk menata pasar. Ia pun berpikir untuk melibatkan tokoh pasar agar tugasnya menjadi ringan. Josrizal mengakui, perlu waktu sekitar satu tahun

> Para *informal leader* yang ada di setiap tempat perlu dipegang, seperti tokoh agama, adat, pemuda, tokoh pasar, dan lainnya.

untuk meyakinkan tokoh pasar. Dia mengundang mereka makan dan berdiskusi, hingga akhirnya mereka bisa bersikap koperatif dengannya.

"Saya mengumpulkan tokoh yang ada di pasar, dan menjelaskan bahwa Pemkot mempunyai program pengolahan sampah. Kami bekerja sama dan mengundang keterlibatan mereka. Keterlibatan itu bisa berwujud memberikan kewenangan tertentu yang bisa mereka lakukan," kata Josrizal.

Menurut Josrizal, para *informal leader* yang ada di setiap tempat perlu dipegang, seperti tokoh agama, adat, pemuda, tokoh pasar, dan lainnya. Pemerintah perlu tegas sekaligus memberdayakan. Inilah yang disebut Josrizal sebagai *delegation of authority*, yaitu memberikan mereka hak yang bisa diperoleh sekaligus memperjelas kewajiban mereka. "Berikan mereka kantor, kasih dana untuk membuat perencanaan, kita bisa memberi tahu mereka bagaimana cara membuat perencanaan yang bagus," jelas Josrizal.

Contoh *delegation of authority* lainnya dipraktikkan Josrizal dengan cara mengangkat Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menjadi Ketua Pokja Kota Sehat. "Mereka bangga saat kita berikan kantor. Beri juga mereka anggaran. Semuanya untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak bisa memengaruhi semua orang, maka perlu memberdayakan orang-orang yang berpengaruh dengan memberikan mereka kewenangan," jelas Josrizal.

Dengan menerapkan strategi *delegation of authority*, Josrizal menceritakan sejumlah keberhasilan yang dicapainya saat menjadi walikota. Strategi ini ia terapkan pula untuk semua urusan

di sektor air minum dan sanitasi. Dalam pembangunan akses air minum, Josrizalmemaksimalkan peran PDAM. Pada 2012 dia sudah berhasil membangun 18.840 sambungan rumah. Artinya, sebanyak 94 persen warga Payakumbuh dapat mengakses air minum. Hal ini merupakan peringkat tertinggi di Indonesia kala itu. Sementara itu, di sektor sanitasi, saat Josrizal pertama kali menjabat, ada 80 persen warga yang BABS, namun di akhir jabatannya hanya tinggal sekitar 16 persen yang BABS. Dia juga membangun infrastruktur IPAL dan IPLT, dan mengolah limbah (cair dan padat) secara komprehensif (mulai produksi sampai pemasaran). Dia juga berhasil mengolah lumpur tinja menjadi pupuk.

Berbagi dan melimpahkan tugas agar tujuan cepat tercapai juga dicontohkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada program yang memaksimalkan peran para camat (bersama pejabat setempat) untuk merangsang pembangunan akses sanitasi. Para camat diminta berperan untuk memudahkan penyediaan bahan baku pembangunan fasilitas sanitasi yang akan dilakukan masyarakat. Camat diminta untuk melakukan koordinasi dengan penjual material dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan bahan baku, atau memberi penghargaan kepada penjual material, atau membentuk satgas gabungan dalam upaya pencapaian target bebas BABS, dan lainnya.

Sejumlah tugas yang langsung menyasar pemerintahan yang dekat dengan masyarakat ini sangat efektif untuk mempercepat pembangunan, karena daya jangkau Pemprov sangat terbatas, sementara kantor kecamatan cukup banyak dan cukup dekat dengan masyarakat.

Setiap daerah bisa menerapkan *delegation of authority* sesuai dengan keadaan, potensi dan tantangan yang ada di setiap daerah.

Bagian IV

# Mobilisasi Pendanaan (*Fundraising*)

Foto-foto: Bank Jombang

1. Bank Jombang, lembaga keuangan yang memberikan perhatian pada kredit sanitasi.
2. Brosur kredit sanitasi yang dimiliki Bank Jombang.

# 11 Libatkan Lembaga Keuangan

Buka lembar baru *micro finance* Indonesia. Kredit adalah hak asasi setiap manusia termasuk mereka yang miskin.

M Yunus
*Peraih Nobel Perdamaian*

"Banyak jalan menuju Roma". Ungkapan ini perlu juga diterapkan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Banyak strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akses, salah satunya dengan mobilisasi pendanaan melalui lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan mikro (*micro finance*). Cara yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan adalah membuka akses kredit kepada masyarakat menengah ke bawah agar bisa memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi. Kredit merupakan cara yang lazim dilakukan lembaga keuangan agar masyarakat bisa mengakses dana. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran diangsur (dicicil).

## Kredit Sanitasi untuk Masyarakat Kecil

Hampir tidak ada bank besar yang melirik kredit sanitasi (khususnya penyediaan jamban) sebagai salah satu produk perbankan mereka. Kredit ini sering dinilai tidak memberikan keuntungan. Berbeda dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPA (Kredit Pemilikan Apertemen), modal usaha, dan lainnya, yang terbukti menguntungkan.

Konsumen kredit jamban umumnya masyarakat kecil yang tidak mempunyai agunan, sehingga sudah dikategorikan tidak *bankable*. Tidak ada jaminan dan penuh dengan resiko. Oleh karena untuk membuat program kredit jamban tidak bisa hanya dengan pendekataan profit dan bankable, perlu visi mengangkat kesejahteraan masyarakat.

> "Untuk membuat program kredit jamban tidak bisa hanya dengan pendekataan profit dan *bankable*, perlu visi mengangkat kesejahteraan masyarakat"

Lembaga keuangan mikro milik pemerintah daerah kiranya perlu melirik kredit ini untuk mendukung program pemerintah setempat dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat. Akses air minum dan sanitasi buruk akan membuat kesejahteraan rendah, sehingga tidak ada jalan lain bagi lembaga keuangan mikro milik pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kredit sanitasi.

Diantara lembaga keuangan selama ini memberikan perhatian besar pada kredit sanitasi ini adalah Bank Jombang. Pengelola Bank Jombang mengakui bahwa kredit sanitasi ini sangat bersentuhan langsung kepada masyarakat miskin, sebab hanya masyarakat miskinlah yang tidak mempunyai jamban dalam rumah mereka. Sementara orang kaya umumnya memiliki jamban walaupun kualitasnya masih perlu dipastikan.

Pelibatan lembaga keuangan juga dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Ekki Riswandiyah, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, saat ini ada kerjasama antara Pemkab Sumedang dengan BPR setempat. BPR siap mengucurkan dana untuk kredit sanitasi kepada pasar sanitasi kabupaten. "Kredit yang diberikan BPR ke sektor sanitasi tidak sama dengan kredit di sektor lain karena ada nilai sosial yang diperjuangkan," kata Ekki.

Ekki mengatakan, selama ini di Sumedang ada pasar sanitasi yang terbentuk di desa, kecamatan, dan kabupaten. Di Sumedang, kewirausahaan sanitasi harus berbasis lembaga, bukan perorangan. Pasar sanitasi merupakan sebuah institusi usaha yang menyediakan produk sanitasi untuk masyarakat. Pasar sanitasi ini selalu ada di bawah sebuah lembaga. Di level desa misalnya, Pasar Sanitasi berada di bawah badan usaha milik desa (BUMDes). Pasar sanitasi berjalan baik, terbukti dengan omset yang terus bertambah. Pasar sanitasi kabupaten, misalnya, setiap bulan minimal mempunyai omzet sekitar Rp 50 juta dan mampu memberi honor lima relawan.

"Dalam menyalurkan kredit, BPR bekerja sama dengan pasar sanitasi kabupaten. BPR merasa lebih aman jika bekerjasama dengan instansi, dalam hal ini pasar sanitasi kabupaten, dibandingkan dengan perorangan," jelas Ekki.

Saat ini, beberapa pasar sanitasi desa sebenarnya sudah menerapkan sistem kredit kepada konsumen. Modal kredit yang dimiliki beberapa pasar sanitasi desa berasal dari dana CSR Bank Jabar Banten (BJB).

> "Kredit jamban tidak hanya akan mempercepat deklarasi bebas BABS, namun juga memastikan kualitas bebas BABS di setiap daerah"

Kehadiran kredit jamban, selain meningkatkan akses sanitasi masyarakat miskin, juga bisa men-

jamin kualitas jamban yang dibangun, karena perbankan akan bermitra dengan wirausahawan sanitasi. Para wirausahawan sanitasi mengerti bagaimana membuat jamban sehat. Mereka tidak hanya membuat jamban dan tangki septik, namun juga memastikan kualitas tangki septik sesuai dengan standar kesehatan. Para wirausahawan sanitasi biasanya juga bermitra dengan sanitarian dari Puskesmas untuk memastikan standar jamban.

Kerja sama antara perbankan, wirausahawan sanitasi, sanitarian, dan warga merupakan skema menarik bagi peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Kredit jamban tidak hanya akan mempercepat deklarasi bebas BABS, namun juga memastikan kualitas bebas BABS di setiap daerah. Dengan beberapa alasan di atas, seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak merangsang lembaga keuangan mikro agar terlibat dalam kredit sanitasi.

### Kredit Sanitasi Tidak Merugikan

Bank Jombang membuktikan bahwa kredit sanitasi sama sekali tidak mendatangkan kerugian. Menurut Usman, Pimpinan Cabang Ploso Bank Jombang, selama ini tidak ada kredit macet (*Nonperforming Loan*/NPL) yang terjadi pada kredit jamban. Ini membuktikan, tidak ada kerugian yang diderita pihak bank selaku pemberi kredit. Usman mengakui, terkadang memang ada nasabah kredit jamban yang terlambat membayar angsuran, namun keterlambatan tersebut masih dalam batas toleransi.

> "Selama ini tidak ada kredit macet (*Nonperforming Loan*/NPL) yang terjadi pada kredit jamban."

Masyarakat umumnya meminjam dana Rp 1,5 juta untuk pembangunan jamban. Bagi masyarakat miskin, dana sebesar itu tentulah cukup besar. Namun bagi pihak perbankan, dana

sebesar itu sangatlah kecil. Sebab itu, kredit jamban seharusnya mudah untuk mendapat kucuran dana dari perbankan. Dana sebesar itu sudah cukup untuk membangun satu paket jamban sehat, terdiri dari WC dan tangki septik, namun belum termasuk dinding WC.

Pengakuan tidak adanya NPL pada kredit sanitasi juga dinyatakan oleh Yulis, *General Manager* Koperasi Denas 66 Pinrang, Sulawesi Selatan. Denas 66 belum lama mempunyai program kredit sanitasi. Saat ini, baru ada puluhan nasabah di kredit ini, dengan ratusan daftar tunggu. Berbeda dari Bank Jombang yang hanya mengucurkan kredit, Koperasi Denas sekaligus menjadi pelaksana pembangunan jamban sehat. Dalam nota kesepakatan dengan dinas kesehatan setempat, Denas 66 ditunjuk untuk menyalurkan kredit sekaligus sebagai pelaksana.

Sebenarnya, ada beberapa tipe jamban sehat yang ditawarkan. Namun, nasabah selama ini lebih memilih tipe 331, yaitu jamban dengan satu kloset, dua tangki septik, dan satu resapan. Kredit yang dikucurkan untuk tipe ini sebesar Rp 1,85 juta. Kredit ini diangsur selama 10 bulan, dan uang muka yang harus disediakan nasabah sebesar Rp 450.000. Untuk kredit sanitasi ini, Denas 66 tidak hanya melayani nasabah di Kabupaten Pinrang, melainkan juga di Sidenreng Rappang (Sidrap). "Kredit Sanitasi tetap saja berisiko karena tanpa agunan, namun selama ini belum ada NPL di kredit tersebut. Jadi, kami tak segan untuk memberi kredit jamban," jelas Yulis.

Selain memberikan kredit sanitasi, Denas 66 juga memberikan kredit penyambungan baru PDAM. Skema kredit penyambungan PDAM berbeda dari kredit sanitasi. Pada kredit sambungan PDAM, Denas 66 ditarget untuk memasang dalam jumlah tertentu oleh PDAM di wilayah operasional mereka. Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk pemasangan PDAM

sebesar Rp 1,2 juta, bisa dicicil selama 10 bulan dengan uang muka Rp 100.000. Yulis mengaku, kredit penyambungan PDAM lebih berisiko dibandingkan kredit sanitasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya NPL sekitar 30 persen dari total penyambungan.

### Kredit Sanitasi Juga Menguntungkan

Rupanya, minat masyarakat untuk mengakses kredit sanitasi sangat luar biasa. Jumlah nasabah terus meningkat. Dalam catatan Usman sebagai Kepala Cabang Ploso Bank Jombang, setidaknya lebih dari 500 orang sudah mengakses kredit tersebut. Layaknya suatu kredit, Bank Jombang juga memberikan beban bunga kepada nasabah. Bunga yang ditetapkan sebesar 0,75 persen per bulan dan dapat dicicil hingga satu tahun. Setiap bulan, sekitar Rp 150.000 perlu diangsurkan masyarakat kepada bank. Jumlah ini tidak memberatkan bagi masyarakat karena memang terjangkau.

> "Setelah mendapatkan kredit, warga disyaratkan melakukan pembangunan menggunakan jasa wirausahawan sanitasi di desa atau kecamatan"

Dalam memberikan kredit, Bank Jombang langsung berhubungan dengan warga. Setelah mendapatkan kredit, warga disyaratkan melakukan pembangunan menggunakan jasa wirausahawan sanitasi di desa atau kecamatan. Syarat ini diberlakukan untuk memastikan bahwa dana yang mereka peroleh benar-benar dipergunakan untuk pembangunan jamban sehat.

Bank Jombang pernah menawarkan kepada wirausahawan sanitasi untuk mengakses modal kerja ke bank, namun wirausahawan sanitasi merasa skema kredit melalui warga lebih tidak berisiko dibandingkan mereka sendiri yang kredit ke bank untuk modal pembuatan jamban warga. Wirausahawan sanitasi

tidak perlu terlibat dalam persoalan kredit, namun mereka siap jika diminta berpartisipasi menjadi salah satu syarat pengucuran kredit.

Dengan bunga 0,75 persen, bank sudah mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Koperasi Denas 66 membebankan bunga kredit sebesar 25 persen selama 10 bulan. Jika warga mengambil kredit sebesar Rp 1,4 juta (setelah dipotong uang muka), maka dalam sepuluh bulan dana yang harus mereka kembalikan sebesar Rp 1,75 juta. Angka ini masih dalam jangkauan warga, sehingga mereka bisa tetap mengakses.

Keuntungan lembaga keuangan yang mengucurkan kredit sanitasi dapat berlipat ganda, mengingat kehadiran program ini membuat Bank Jombang dikenal sebagai bank yang memiliki kepedulian sosial. Pengelola Bank Jombang pun kini sering dipanggil menjadi salah satu pembicara pada kegiatan terkait akses air minum dan sanitasi. Dalam melaksanakan misinya, selain didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Bank Jombang juga didukung oleh *World Bank* dan WSP (*Water and Sanitation Program*).

Melihat keberhasilan kredit sanitasi, Bank Jombang juga berencana mengucurkan kredit penyambungan pipa PDAM. Usman yakin, penyambungan PDAM akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mereka bisa mengakses air minum dengan mudah.

Kini, mulai ada bank besar yang melirik kredit sanitasi. Keberhasilan sejumlah BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya membuat sejumlah bank merasa yakin bahwa kredit sanitasi mempunyai potensi lumayan besar. Akhirnya, semakin banyak bank tergerak untuk memberikan kredit di sektor ini diyakini akan membuat target pembangunan akses air minum dan sanitasi semakin cepat tercapai.

Foto-foto: Adaro

Beberapa kegiatan CSR PT Adaro Energy Tbk di sektor air minum dan sanitasi.

# 12 Menggalang Dukungan Pendanaan

Belum pernah saya dengar orang berbuat sosial lalu bangkrut.

TAHIR
*Pendiri Mayapada Group/Pendiri Tahir Foundation*

Anggaran pemerintah tidak pernah mencukupi untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai 100 persen akses air minum dan sanitasi. Hal ini diakui oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas, Dedy S. Priatna. Itu sebabnya, dia menyampaikan perlunya sinergi antara pemerintah dengan berbagai pihak. "Jika semua pemerintah daerah menganggarkan sekitar dua persen APBD untuk air minum dan sanitasi, maka dibutuhkan sekitar 15 tahun untuk mencapai akses universal. Karena itu, perlu dukungan pemerintah dan instansi swasta karena dana pemerintah tidak pernah cukup," kata Dedy.

Pemerintah perlu mempunyai strategi untuk menggali pendanaan dari pihak lain. CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan merupakan salah satu sumber pendaaan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan akses air minum dan sanitasi. Kolaborasi antara APBD dan CSR bisa semakin efektif jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan yang ada di daerah mereka.

## Peta Pembangunan

Setiap daerah mempunyai cara tersendiri untuk mengolaborasi APBD dan CSR. Kabupaten Tangerang, misalnya, membuat Buku Biru yang memuat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP). Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyebut Buku Biru ini sebagai Buku Menu. Ada rencana pembangunan yang tidak dibiayai oleh APBD, dan perusahaan swasta bebas memilih "menu" pembangunan yang akan mereka lakukan sesuai dengan target dan biaya yang dimiliki.

> "Pembuatan '*Buku Menu*' bertujuan untuk mensinergikan antara pembangunan yang dibiayai APBD dan pihak swasta"

Dalam buku tersebut, tercantum pembangunan WC atau MCK yang besaran nilainya Rp 8 juta per unit, atau anggaran perbaikan rumah menjadi layak huni sebesar Rp 15 juta per unit. Jika ada dana lebih besar, perusahaan bisa memilih "menu" pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau IPAL Komunal yang nilainya bisa mencapai Rp 100 juta. Perusahaan juga bisa memilih paket "menu" sanitasi sekolah, termasuk membangun sekolah dasar dengan berbagai tipe. Besaran nilai untuk membangun SD antara Rp 160 juta hingga Rp 180 juta. "Pembuatan '*Buku Menu*' bertujuan untuk mensinergikan antara

pembangunan yang dibiayai APBD dan pihak swasta," kata Ahmed Zaki.

Ahmed Zaki berharap, partisipasi perusahaan dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi bisa mengurangi kawasan kumuh dan menghilangkan kebiasaan warga yang BABS. "Untuk sampai ke Kabupaten Tangerang, hanya perlu membayar dua kali jalan tol dari Ibu Kota Jakarta. Tetapi mengapa masih banyak warga yang BABS, termasuk di dekat Bandara Soekarno-Hatta," jelas Ahmed Zaki.

Cara lain dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan memberikan penghargaan khusus pada pihak swasta jika program CSR turut menyukseskan program bebas BABS. Pemberi CSR diundang pada saat deklarasi bebas BABS. Dengan demikian, ada keuntungan timbak balik yang bisa diperoleh. Pihak kabupaten/kota terbantu dengan dukungan dana, sementara pihak perusahaan terbantu dengan semakin meningkatnya eksistensi, nama, dan kredibilitasnya.

Sementara itu di Buleleng Bali, sejak tahun 2013, pemerintah setempat membuat *CSR Gathering*, dimana bupati mengambil peran sebagai tuan rumah. Kegiatan ini cukup berhasil untuk menggalang pendanaan dari luar APBD.

### Pokja Khusus Air Minum dan Sanitasi

Banyak cara bisa dilakukan untuk mensinergikan pembiayaan APBD dan swasta. Sinergi ini bisa dilakukan dengan membuat kelompok kerja (Pokja) khusus yang beranggotakan perusahaan dengan pemerintah. Cara ini telah dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk di tiga kabupaten tempat perusahaan ini beroperasi, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara—semuanya terletak di Kalimantan Selatan.

Pokja pengelola dana CSR PT Adaro terdiri dari multi

*stakeholders* yang merupakan representasi dari manajemen PT Adaro Energy Tbk, SKPD Pemda, dan unsur masyarakat. Pokja ini sepenuhnya mengelola dana CSR dari PT Adaro Energy Tbk yang dialokasikan setiap tahun di setiap kabupaten. "Setiap tahun untuk setiap kabupaten, PT Adaro Energy Tbk mengalokasikan dana CSRnya untuk membantu masyarakat. Dana dikelola oleh tim *ad hoc* semacam Pokja yang bertugas mendeteksi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menyeleksi proposal masuk, dan menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat," ungkap Ghufron Sholihin, Program Manager PT Adaro Energy Tbk.

> "Dana dikelola oleh tim *ad hoc* semacam Pokja yang bertugas mendeteksi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menyeleksi proposal masuk, dan menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat"

Pembangunan CSR air minum dan sanitasi yang ditangani PT Adaro Energy Tbk dilakukan di area ring satu perusahaan. Sejak tahun 2009, perseroan menyediakan kebutuhan air bagi 1.110 KK, di mana 660 KK di antaranya dibangunkan penyambungan pipa air permanen ke setiap rumah. Sementara itu, kebutuhan air untuk 550 KK lainnya dilakukan melalui mobil tangki. Untuk sektor air minum, PT Adaro Energy Tbk juga bekerja sama dengan PDAM untuk pembangunan *Water Treatment Plan* dan pipa induk. PT Adaro Energy Tbk bertugas menyambungkan pipa air ke rumah-rumah warga, sementara PDAM bertugas merawat dan mengelola iuran pemeliharaan warga agar berkesinambungan.

Program lain yang dilakukan perusahaan ini adalah pelatihan dan sosialisasi cuci tangan pakai sabun (CTPS). Sosialisasi telah menjangkau 39 guru dan kepala sekolah, 1.560 siswa dari 20 Sekolah, dan dukungan sarana sanitasi untuk 15 SD dan 2 SMP. Program ini mampu berkontribusi pada deklarasi bebas

BABS di sejumlah desa, dan pada tahun 2015 ditargetkan ada dua kecamatan yang bebas BABS. Dana yang digelontorkan PT Adaro Energy Tbk untuk pembangunan sanitasi dan air minum mencapai miliaran rupiah.

Ghufron menjelaskan, salah satu alasan PT Adaro Energy Tbk terlibat dalam pembenahan air minum dan sanitasi di sejumlah kabupaten didasarkan pada angka perilaku BABS dan akses fasilitas sanitasi di Kalimantan Selatan masih di bawah angka nasional. Program CSR yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat, menurut pihak manajemen perusahaan, merupakan salah satu cara hidup harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

## Lembaga Sosial juga Perlu Terlibat

Tidak hanya perusahaan yang memberikan bantuan pendanaan pada sektor air minum dan sanitasi. Sejumlah lembaga sosial juga memberikan perhatian serupa, seperti Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Program "1.000 Jamban untuk Sehatnya Keluarga Indonesia" yang dilakukan lembaga ini mampu mendapatkan penghargaan MDGs *Award* 2013.

Menurut Direktur PKPU Ira Wardani, lembaganya memberikan kontribusi pendanaan setelah melakukan survei yang hasilnya menyebutkan bahwa di Kabupaten Bekasi banyak keluarga miskin belum memiliki jamban sehat. "Kami memang bergerak atau fokus pada masyarakat miskin. Kami mengunjungi beberapa desa dan perkampungan, dan akhirnya kami berfikir untuk mencoba bergerak di sisi yang sebenarnya sangat mendasar ini," ujar Fery Suranto, salah satu manajer di PKPU.

Semua cara perlu dilakukan untuk menggalang potensi pendanaan dari luar APBD dan APBN.

Foto-foto: Pemkot Banda Aceh

1. Pabrik pengolahan sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
2. Hasil olahan bijih plastik yang memberikan nilai tambah.

# 13 Swadana Pengelolaan

Kepala daerah perlu menerapkan prinsip *entrepreneurship*, di mana semua sumberdaya yang ada bisa dikelola dengan memberikan nilai tambah.

JOSRIZAL ZAIN
*Direktur Eksekutif AKKOPSI*

Operasional fasilitas air minum dan sanitasi tidak harus bertumpu pada dana pemerintah (APBD atau APBN). Pemerintah daerah bisa menggali pendanaan lainnya, seperti menerapkan manajemen modern berorientasi bisnis. Cara ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan pendanaan dari APBD atau APBN. Pengelolaan model bisnis biasanya dilakukan lebih profesional. Ada pengurus atau pengelola dan dibayar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada pula pihak konsumen yang membayar berdasarkan layanan yang mereka dapatkan, dan ada juga pihak ketiga yang bekerja di antara pengelola dan

konsumen. Pengelolaan berbasis manajemen bisnis biasanya lebih memperhatikan layanan. Layanan inilah yang menjadi benang merah yang menghubungkan antara pengelola, konsumen, dan pihak ketiga.

Ada beberapa fasilitas yang bisa dikelola melalui manajemen modern berbasis bisnis, di antaranya Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Di sejumlah daerah, IPLT berada di bawah salah satu dinas pemerintahan, dengan biaya operasional umumnya berasal dari APBD. Namun bagi daerah yang kreatif, mereka tidak menggunakan APBD dan cukup mengandalkan swadana pengelolaan yang bersumber dari retribusi jasa yang ditarik dari konsumen. Konsumen bisa berasal dari masyarakat atau penyedia jasa sedot tinja yang membuang limbahnya ke IPLT.

## Libatkan Pihak Swasta

Kota Banda Aceh merupakan contoh menarik bagaimana pengelolaan IPLT secara modern berbasis bisnis. IPLT Banda Aceh yang berada di bawah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) ini menerapkan sistem terbuka (kapasitas 50 $m^3$/hari) dan tertutup (kapasitas 85 $m^3$/hari).

Untuk melayani penyedotan tinja, DK3 menawarkan jasa penyedotan yang bisa dipesan melalui saluran telepon. Dari jasa ini, DK3 mendapatkan retribusi yang bisa dipergunakan untuk operasional pengelolaan. Tarif yang ditawarkan beragam, tergantung jarak dan objek yang akan disedot: apakah sumur resapan jamban atau bak penampungan.

Dalam pelayanannya, DK3 tidak melakukan monopoli. Namun, instansi ini membolehkan adanya pihak swasta yang melakukan penyedotan kepada warga. Pelibatan pihak swasta dalam penyedotan tinja memberikan keuntungan ganda. Selain memberikan alternatif layanan kepada masyarakat, juga bisa

menghadirkan kompetisi antara DK3 dan jasa sedot swasta. Kompetisi ini membuat terjadi persaingan sehat yang berimbas pada peningkatan pelayanan kepada konsumen. Kehadiran jasa sedot tinja swasta juga memberikan pemasukan tambahan kepada IPLT.

### Hasilkan Nilai Tambah

IPLT Banda Aceh dibangun atas bantuan Pemerintah Jepang melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dan bantuan Unicef. Sejak selesai dibangun (IPLT sistem terbuka selesai pada tahun 2005, sementara IPLT sistem tertutup selesai pada 2007), IPLT langsung difungsikan dan hingga saat ini masih terawat dan berfungsi dengan baik. Satu hal lagi yang juga berbeda dari daerah lain yakni biaya operasional pengelolaan IPLT sudah dapat ditutupi sepenuhnya dari retribusi pelayanan penyedotan tinja dan pelayanan IPLT. Padahal, sejumlah daerah di Indonesia yang mengfungsikan IPLT belum mampu membiayai pengelolaan yang berasal dari dana retribusi semata.

> "*Alhamudulillah* sejak pertama kali dioperasikan hingga saat ini, IPLT Kota Banda Aceh tidak pernah mendapatkan APBD. Dana pengelolaan IPLT bisa dipenuhi dari biaya yang dibayarkan truk penyedot tinja"

Setiap tahun, jumlah pengangkutan lumpur tinja ke lokasi IPLT selalu bertambah. Pada tahun 2012, ada 1.622 kali pengakutan (*trip*) lumpur tinja oleh truk, baik yang dikelola swasta maupun pemerintah. Volume tinja yang diangkat pada tahun tersebut sebesar 4.355 meter kubik. Jumlah itu berkembang pada tahun 2013 menjadi 2.350 trip dan volume sebesar 8.935 meter kubik. Bertambahnya trip dan volume tinja ini juga

> Ini merupakan pengolahan limbah plastik pertama yang dikelola sendiri oleh dinas pemerintah, mulai dari pembelian, penyortiran, penggilingan, pengemasan hingga penjualan

menandakan pertumbuhan pemasukan yang diterima pengelola IPLT. Tambahan pemasukan semakin memudahkan pengelolaan IPLT. Peningkatan volume juga membuktikan kinerja pengelolaan IPLT semakin membaik. "*Alhamudulillah* sejak pertama kali dioperasikan hingga saat ini, IPLT Kota Banda Aceh tidak pernah mendapatkan APBD. Dana pengelolaan IPLT bisa dipenuhi dari biaya yang dibayarkan truk penyedot tinja," kata Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal.

Pendapatan tidak hanya dari pengolahan lumpur tinja, namun juga dari pabrik plastik yang dikelola oleh DK3. Pabrik yang didirikan pada tahun 2009 ini menerima bahan baku yang sebagian besar dibeli dari pemulung dan bank sampah di Kota Banda Aceh. Dalam sehari, pabrik yang mempekerjakan 12 orang ini rata-rata memproduksi 200-250 kilogram plastik yang sudah dicacah, untuk kemudian dijual ke Medan dan wilayah Jawa. Ini merupakan pengolahan limbah plastik pertama yang dikelola sendiri oleh dinas pemerintah, mulai dari pembelian, penyortiran, penggilingan, pengemasan hingga penjualan. Dari pengolahan itu, Pemkot Banda Aceh memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2013, PAD yang diperoleh dari pengolahan ini sebesar Rp 48,8 miliar. Ini membuktikan, jika dinas setempat mau mengelola limbah (padat maupun cair), mereka tidak hanya mampu mendanai biaya operasional, melainkan juga dapat memberikan pemasukan untuk keberlanjutan program.

Seri Policy Entrepreneur Vol. 1

# BELAJAR DARI *CHAMPIONS*

## Kiat Sukses Membangun Air Minum dan Sanitasi

Pokja AMPL Nasional

**Belajar dari *Champions***
**Kiat Sukses Membangun Air Minum dan Sanitasi**

Perbedaan para kampiun *(champions)* dengan yang bukan dapat mudah dikenali. Para *champion* akan berbicara mengenai permasalahan dan tantangan yang sudah berhasil diatasi sedangkan *non-champion* biasanya selalu mengungkapkan permasalahan dan tantangan yang selalu dan sedang dihadapinya. Para *champion* berhasil mengatasi segala kemampatan dengan cara yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh para pendahulunya baik di suatu daerah maupun pada bidang tertentu.

Sebagian besar para *champion* juga merupakan para *policy entrepreneur,* berasal dari berbagai kalangan seperti staf di pemerintahan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat biasa. Mereka datang tak kenal lelah membawa pemikiran kritis terhadap kondisi yang dihadapinya, membangun ide baru yang kreatif, mengimplementasikan idenya, kemudian berhasil mengajak masyarakat bersama-sama melakukan perubahan besar dalam lingkungannya. Mereka adalah para katalis perubahan yang memahami betul kunci-kunci perubahan dan seringkali bekerja melintasi batas-batas kemustahilan.

Para *champion* berhasil menempatkan sektor air minum dan sanitasi yang sebelumnya terpinggirkan menjadi salah satu primadona yang harus mendapatkan prioritas di masyarakat. Yang lebih penting lagi, mereka berhasil memberikan terobosan pelayanan dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak untuk masyarakat. Suatu pelayanan yang sebelumnya mahal dan langka menjadi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Maka salah satu cara terbaik untuk belajar adalah bagaimana memahami kiat-kiat sukses para *champion*. Lebih penting lagi, kehadiran para *champion* diharapkan dapat melahirkan *champion* lainnya.

"Mengubah perilaku masyarakat sehingga mereka menjadi pelaku dalam pembangunan sangatlah tinggi nilainya."
—**Andrinof Chaniago,** Menteri PPN/Kepala Bappenas

"Saat ini kondisi pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat belum sesuai harapan. Kita perlu bekerja keras mengejar ketertinggalan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Dengan peran para *champion* kita optimis akses universal air minum dan sanitasi bisa terwujud."
—**Budi Yuwono,** Anggota Komisi V DPR 2014-2019

POKJA AMPL

**WASPOLA Facility**
Indonesia Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning Facility

ISBN 978-979-17112-8-9
9 789791 711289